

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



LKJIP 2022

**KABUPATEN
HALMAHERA
UTARA**

<https://halmaherautarakab.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan hikmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja tahun terakhir dari periode 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, hal ini sebagai perwujudan dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan **Good Governance** dan **Clean Government**.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparatur pemerintahan daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, 31 Maret 2023
BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan, juga sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang tahun 2022, dan akhir periode RPJMD 2021-2026.

Pada awal tahun 2022 dilaksanakan pembahasan perubahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026, dengan Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Halmahera Utara, ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah “ ***Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan***”. Dalam upaya perwujudan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yang kemudian menjadi landasan penetapan 7 (tujuh) tujuan strategis Kabupaten Halmahera Utara dan 12 (dua belas) sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan instrumen pengukuran 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja sasaran.

Capaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kategori **Baik Sekali** dengan persentase rata-rata **100,31%** dan 1 sasaran dengan kategori **Baik** atau **95,11%**;
- Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kategori **Baik** dengan persentase rata-rata **98,35%**;
- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (dua) sasaran dengan kategori **Baik Sekali** dengan persentase rata-rata **144,12%** dan 1 (satu) sasaran dengan kategori **Baik** atau **88,69%**;

- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) sasaran kategori **Cukup** atau persentase rata-rata **56,75%**.

Dengan hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	2
1.2.1 KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM	2
1.2.2 ARTI LAMBANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA	3
1.2.3 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI	4
1.2.4 DEMOGRAFI	5
1.2.5 PERTUMBUHAN EKONOMI	5
1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	7
1.4 SUMBER DAYA APARATUR	9
1.5 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	10
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	23
2.1.1 VISI & MISI	23
2.1.2 PROGRAM	26
2.2 PERJANJIAN KINERJA	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	34
3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2022	34
3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA	35
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	66
BAB IV PENUTUP	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 2. Logo Kabupaten Halmahera Utara

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 4. Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Tabel 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 7. Sasaran Strategis, Program dan Anggaran

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022

Tabel 9. Pencapaian Indikator Sasaran

Tabel 10. Efisien Program dan Pendanaan Tahun 2022

Tabel 11. Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2022

Tabel 12. Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022

Tabel 13. Sasaran Strategis 1

Tabel 14. Sasaran Strategis 2

Tabel 15. Indeks Pembangunan manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin

Tabel 16. Indeks Pembangunan Gender Daerah (IPG)

Tabel 17. AHH laki-laki dan Perempuan Kab. Halmahera Utara 2021 – 2022

Tabel 18. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 – 2022

Tabel 19. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin

Tabel 20. Sasaran Strategis 3

Tabel 21. Program dan Kegiatan

Tabel 22. Sasaran Strategis 4

Tabel 23. Sasaran Strategis 5

Tabel 24. Sasaran Strategis 6

Tabel 25. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)

Tabel 26. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Tabel 27. Sasaran Strategis 7

Tabel 28. Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Tabel 29. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Tabel 30. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2022

Tabel 31. Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggara negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas serta Asas Akuntabilitas. "Asas Akuntabilitas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 7 merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap kegiatan harus dilaporkan atau disediakan informasi tentang kinerja pemerintah, yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan untuk disampaikan ke Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Kepala BAPPENAS serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban suatu instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan Kinerja Pemerintah selama satu tahun. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beberapa kegiatan telah menghasilkan *outcome* dan beberapa lainnya masih pada taraf *output*. Namun demikian, hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang tidak saja kepada pencapaian Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi tetapi juga berbagai program dan kebijakan pemerintah secara umum.

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1 Keadaan Geografis Wilayah

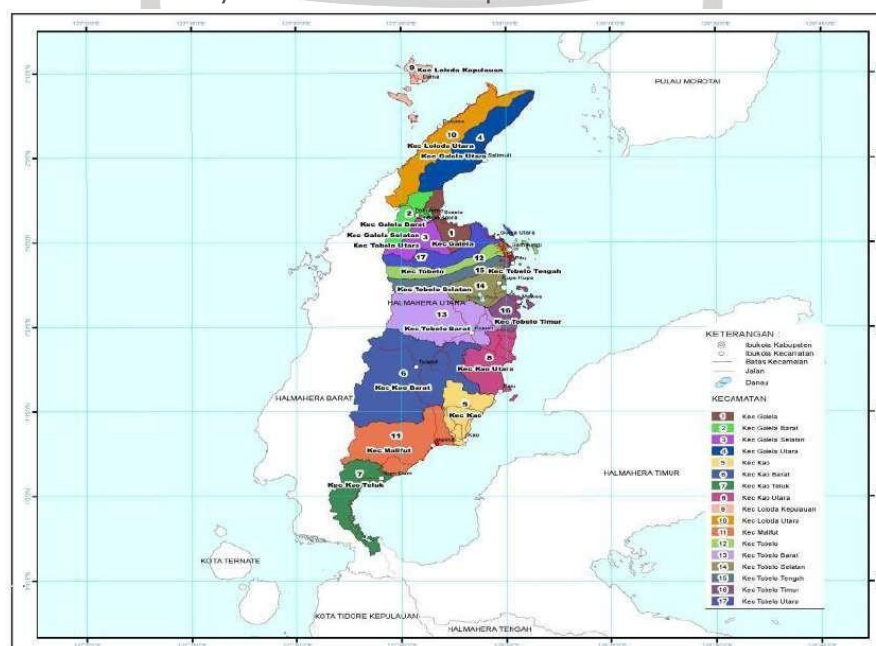
Kabupaten Halmahera Utara terbentuk pada 31 Mei 2003 berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, dengan ibukota di Tobelo. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.019,96 Km², meliputi daratan seluas 3.404,28 Km² (15,5%) dan lautan 18.615,68 Km² (84,5%), dan secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pulau Morotai dan Samudera Pasifik
- Selatan : Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- Barat : Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- Timur : Kab. Pulau Morotai dan Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur

Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah agraris sekaligus maritim merujuk pada panjang garis pantai yang mencapai 515,1 km atau 7,5 persen dari total garis pantai Provinsi Maluku Utara sepanjang 6.823,5 km. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi alam yang besar meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Sejalan dengan pembentukan kabupaten baru, sembilan kecamatan dimekarkan menjadi 22 kecamatan dan 174 desa menjadi 260 desa. Seiring ditetapkannya Pulau Morotai sebagai kabupaten tersendiri berdasarkan UU No. 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, jumlah kecamatan berubah menjadi 17 dan 196 desa.

Disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, peta wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Utara



Sumber Data: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara

1.2.2 Arti Lambang Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 2
Logo Kabupaten Halmahera Utara



1. **Perisai besar dengan warna dasar biru** bermakna sebagai suatu potensi sumber daya alam dengan berbagai kekayaan yang ada di Jazirah Halmahera Utara;
2. **Humarang dan salawaku** mempunyai makna sebagai kekuatan, keuletan, jati diri dan keadilan serta ketangguhan dalam membangun dan mempertahankan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara; salawaku dengan sembilan bentuk hiasan putih menunjukan bahwa Kabupaten Halmahera Utara pada saat diresmikan terdiri dari sembilan kecamatan yang memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi serta menghargai dan menghormati semua etnis yang bergabung dalam satu kesatuan keluarga besar Hibualamo;
3. **Daun kelapa berwarna hijau** dengan 31 (tiga puluh satu) helai bermakna kesuburan, mencerminkan potensi kekayaan alam, kehidupan dan kemampuan pengelolaannya dimana kelapa sebagai komoditi unggulan Halmahera Utara. 31 (tiga puluh satu) helai daun kelapa juga bermakna tanggal peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu tanggal 31;
4. **Lingkar putih besar yang dihiasi dengan 10 (sepuluh) suku dan soa.** Secara filosofi merupakan suatu komitmen masyarakat untuk hidup bersama-sama berdampingan secara damai, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai walaupun berbeda suku, agama dan golongan. Juga lingkaran putih sebagai penghias kemudi perahu bermakna berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
5. **Segi lima berwarna kuning keemasan** bermakna Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Juga segi lima bermakna bulan peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu bulan Mei;
6. **Laut dan gelombang** melambangkan dinamika kehidupan masyarakat Halmahera Utara yang berjuang dan tangguh menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Pancaran ombak berwarna putih yang menghiasi

keindahan di sekitar perahu, bermakna bersih, suci, lahir dan batin, sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Halmahera Utara;

7. **Perahu berwarna coklat, sebagai lambang perahu adat masyarakat Halmahera Utara** bermakna sebagai sarana kehidupan, mata pencaharian dan alat transportasi. Warna coklat bermakna kearifan dan kewibawaan masyarakat Halmahera Utara untuk berjuang mencapai masa depan yang damai, adil dan sejahtera;
8. **Warna putih dalam perisai segi lima** melambangkan kesucian dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan kearifan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
9. **Hibua Lamo berwarna putih bersih dengan empat tiang penyangga berwarna hitam** bermakna rumah adat masyarakat Halmahera Utara yang artinya rumah besar yang dapat mempersatukan semua jenis etnis dengan perbedaan suku dan ras dalam satu atap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah dipermainkan oleh siapapun yang ingin merusak tatanan dan norma pendidikan, harmonis dan demokratis yang telah dibina selama ini. Pita merah putih bertuliskan Hibua Lamo bermakna keberanian dan kesucian Halmahera Utara untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
10. **Angka 2003** bermakna sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara.

1.2.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif, saat ini Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 196 Desa. Wilayah kecamatan dengan luas terbesar adalah Kao Barat Barat dengan proporsi 24,56 persen, disusul Kecamatan Malifut dengan proporsi 10,56 persen, serta Galela Utara dengan proporsi 7,89 persen dan Loloda Utara dengan proporsi 7,27 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Adapun wilayah kecamatan dengan luas terkecil yaitu Galela, Tobelo Timur dan Loloda Kepulauan, masing-masing dengan proporsi 2,80 persen, 2,16 persen dan 1,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan terjadi pada luas Kecamatan Kao Teluk, yaitu dari 158,57 Km² menjadi 111,83 Km² menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019.

Rincian luas wilayah masing-masing kecamatan selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
				Km2	Proporsi (%)
1	Malifut	Ngofakiaha	22	359,44	10,56
2	Kao Teluk	Dum Dum	11	111,83	3,28
3	Kao	Kao	14	138,43	4,07
4	Kao Barat	Tolabit	21	835,93	24,56
5	Kao Utara	Daru	12	221,85	6,52
6	Tobelo Selatan	Kupa Kupa	13	136,01	4,00
7	Tobelo Barat	Kusuri	5	249,81	7,34
8	Tobelo Timur	Mawea	6	73,52	2,16
9	Tobelo	Gamsungi	10	126,07	3,70

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
				Km2	Proporsi (%)
10	Tobelo Tengah	Pitu	9	111,99	3,29
11	Tobelo Utara	Gorua	10	151,56	4,45
12	Galela	Soa Sio	7	95,47	2,80
13	Galela Selatan	Soakonora	7	113,86	3,34
14	Galela Barat	Dokulamo	9	110,59	3,25
15	Galela Utara	Salimuli	12	268,68	7,89
16	Loloda Utara	Dorume	18	247,62	7,27
17	Loloda Kepulauan	Dama	10	51,61	1,52
Halmahera Utara		Tobelo	196	3.404,27	100,00

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2022

1.2.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada akhir Tahun 2022, berdasarkan data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebanyak **201.343** orang. Kecamatan Tobelo merupakan penduduk terbanyak dengan jumlah **33.344** jiwa, sedangkan Kecamatan Tobelo Barat adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu **6.075** jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
1	Tobelo	33.344
2	Tobelo Tengah	15.834
3	Tobelo Utara	12.124
4	Tobelo Timur	7.026
5	Tobelo Selatan	15.152
6	Tobelo Barat	6.075
7	Galela	8.677
8	Galela Selatan	9.304
9	Galela Barat	11.172
10	Galela Utara	9.335
11	Loloda Kepulauan	7.831
12	Loloda Utara	10.654
13	Kao	9.727
14	Kao Barat	9.849
15	Kao Utara	14.148
16	Malifut	14.082
17	Kao Teluk	7.009
Total		201.343

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2022

1.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Ekonomi Makro daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Indikator-indikator tersebut ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pencapaian dari indikator-indikator ini terjadi akibat akumulasi pencapaian kinerja sektor perekonomian yang melibatkan berbagai faktor produksi dalam transaksi barang dan jasa. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sementara Pendapatan Perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka ini didapat dari total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara antara lain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Halmahera Utara dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sektor/Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Halmahera Utara (Persen)		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,33	23,10	22,18
Pertambangan dan Penggalian	29,92	31,23	31,93
Industri Pengolahan	2,97	2,58	2,56
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09
Konstruksi	6,86	7,01	6,98
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,23	12,10	12,29
Transportasi dan Pergudangan	2,09	2,06	2,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,28	0,28
Informasi dan Komunikasi	2,59	2,52	2,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,70	1,74
Real Estate	0,07	0,06	0,06
Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,76	12,11	12,19
Jasa Pendidikan	2,78	2,72	2,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,82	1,80	1,74
Jasa lainnya	0,45	0,44	0,43
Total PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022

1.3. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam ketentuan Umum dijelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Perubahan signifikan dari pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan yang diserahkan kepada daerah yakni urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pilihan yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.

Unsur pembantu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah;
2. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat DPRD;
3. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah;
4. Unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah;
5. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah; dan
6. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 48 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 22 Dinas, 6 Badan, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat dan 17 Kecamatan.

Tabel 4
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
1	SEKRETARIAT	1	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan - Bagian Hukum dan HAM - Bagian Organisasi - Bagian Perekonomian dan Kesra - Bagian Umum dan Perlengkapan - Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan - Bagian Unit Layanan Pengadaan - Bagian Sekretariat Korpri
		2	Sekretariat DPRD
2	INSPEKTORAT	3	Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara
3	DINAS	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Dinas Kesehatan
			- RSUD Tobelo
		6	Dinas Pariwisata
		7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		10	Dinas Sosial
		11	Dinas Kependudukan dan Capil
		12	Dinas Pertanian
		13	Dinas Kelautan dan Perikanan
		14	Dinas Perhubungan
		15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA & KB
		16	Dinas Lingkungan Hidup
		17	Dinas Ketahanan Pangan
		18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		20	Dinas Satpol PP
		21	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		22	Dinas Pemuda dan Olahraga
		23	Dinas Koperasi dan UMKM
		24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	BADAN	26	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		29	Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDA
		30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		31	Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik
5	KECAMATAN	32	Kantor Camat Kao Teluk
		33	Kantor Camat Malifut
		34	Kantor Camat Kao
		35	Kantor Camat Kao Barat

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
	36	Kantor Camat Kao Utara
	37	Kantor Camat Tobelo Barat
	38	Kantor Camat Tobelo Timur
	39	Kantor Camat Tobelo Selatan
	40	Kantor Camat Tobelo Tengah
	41	Kantor Camat Tobelo
	42	Kantor Camat Tobelo Utara
	43	Kantor Camat Galela
	44	Kantor Camat Galela Selatan
	45	Kantor Camat Galela Barat
	46	Kantor Camat Galela Utara
	47	Kantor Camat Loloda Utara
	48	Kantor Camat Loloda Kepulauan

Sumber Data: Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

1.4. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan akhir tahun 2022 yang masih melaksanakan tugas sebanyak **3.473** pegawai terdiri dari laki-laki berjumlah **1.573** pegawai dan perempuan berjumlah **1.900** pegawai sesuai tabel berikut ini:

Tabel 5
Jumlah Aparatur Sipil Negara

NO	NAMA SKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
1	SEKRETARIAT DAERAH	4	1	5
	- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	8	2	10
	- BAGIAN HUKUM DAN HAM	9	2	11
	- BAGIAN ORGANISASI	5	4	9
	- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	5	2	7
	- BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	20	10	30
	- BAGIAN ADM. DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	5	7	12
	- BAGIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN	4	2	6
	- BAGIAN SEKRETARIAT KORPRI	4	2	6
2	SEKRETARIAT DPRD	14	15	29
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26	10	36
4	DINAS KESEHATAN	16	17	33
5	DINAS PARIWISATA	11	13	24
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22	9	31
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN	17	5	22
8	DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN	17	9	26
9	DINAS SOSIAL	10	4	14
	- UPTD PANTI SOSIAL	3	2	5

NO	NAMA SKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9	6	15
11	DINAS PERTANIAN	26	17	43
	- JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN	30	24	54
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	25	10	35
13	DINAS PERHUBUNGAN	49	8	57
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA & KB	5	14	19
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15	12	27
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	20	6	26
17	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN	14	5	19
18	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	15	9	24
19	DINAS SATPOL	30	1	31
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	9	3	12
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	17	3	20
22	DINAS KOPERASI DAN UMKM	13	10	23
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	6	16
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21	28	49
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18	13	31
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13	9	22
27	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17	10	27
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	12	15	27
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	22	6	28
30	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN & STATISTIK	12	6	18
31	INSPEKTORAT	19	9	28
32	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	14	15	29
	- JABATAN FUNGSIONAL RSUD TOBELO	41	138	179
33	BNN	6	1	7
34	SEKRETARIAT KPUD	6	2	8
35	17 KECAMATAN	120	90	210
36	20 PUSKESMAS	69	328	397
37	17 UPTD DIKNAS	26	21	47
38	GURU	576	945	1521
39	SEKDES	71	2	73
40	TATA USAHA SEKOLAH	16	11	27
41	PENJAGA SEKOLAH	7	1	8
TOTAL		1.573	1.900	3.743

Sumber Data: BKD dan PSDA Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan klasik yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Skala prioritas adalah merupakan strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah melalui program kegiatan pemerintah daerah. yang dapat dilihat pada data informasi urusan

penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan fungsi penunjang pemerintahan.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dapat diuraikan berdasarkan data dan informasi setiap urusan penyelenggara pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

- a. Belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang usia 13-15, yaitu 96,33 persen; di sisi lain Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMP cenderung menurun, dari 79,26 persen di tahun 2015 menjadi 70,91 persen di tahun 2019;
- b. Masih banyak siswa SD dan SMP yang putus sekolah dan mengulang;
- c. Masih banyak anak usia 4-6 tahun belum menikmati pendidikan anak usia dini, yang disebabkan: 1) belum seluruh desa tersedia sarana prasarana PAUD; dan 2) masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini;
- d. Masih ada lebih dari 10 persen ruang kelas (SD dan SMP) dalam kondisi rusak berat/rusak total;
- e. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi, yang disebabkan: 1) sejumlah sekolah baru didirikan kurang dari empat tahun; dan 2) masih ada sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan;
- f. Masih banyak guru SD dan SMP yang belum bersertifikasi pendidik, yang disebabkan: 1) kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi syarat; dan 2) kompetensi guru di bawah standar yang disyaratkan;
- g. Belum meratanya ketersediaan guru di setiap sekolah (PAUD, SD dan SMP) dikarenakan kurangnya tenaga pendidik;
- h. Belum meratanya akses pendidikan non formal yang ditandai dengan masih ada kecamatan yang belum memiliki PKBM; di sisi lain ada PKBM yang tidak memiliki siswa.

KESEHATAN

- a. Masih terjadi kematian Ibu, disebabkan: 1) Persalinan tidak ditolong tenaga kesehatan; 2) Persalinan tidak dilakukan di Fasilitas Kesehatan; 3) Ibu hamil yang melahirkan dengan komplikasi penyakit bawaan; 4) Ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan K4; 5) Ada ibu hamil yang belum mendapatkan Fe 90 tablet; 6) Belum semua Bidan terlatih
- b. Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal (PPGDON);
- c. Belum semua bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal (APN);
- d. Masih ada kematian Bayi, disebabkan: 1) Masih ada Puskesmas belum mampu melayani pelayanan neonatal esensial; 2) Bayi lahir dengan komplikasi yang tidak mampu ditangani; 3) Alat resusitasi bayi yang rusak; dan 4) Petugas belum terlatih penggunaan Alat Resusitasi;
- e. Prevalensi Balita Underweight, Stanting dan Wasting di beberapa Kecamatan masih tinggi, disebabkan: 1) Masih ada ibu Nifas yang tidak mendapatkan Vit A; 2) Balita yang tidak datang

- ke Posyandu; 3) Balita yang tidak mendapatkan Vit A; 4) Bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif; 5) Ibu hamil yang Kekurangan Energi Kalori (KEK); 6) Masih kurangnya tenaga Nutrition di Puskesmas; dan 7) Balita yang Gizi Buruk tidak mendapatkan penanganan;
- f. Masih kurangnya SDM kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas;
 - g. Masih tingginya Angka Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, disebabkan belum optimalnya Pelayanan, penanganan dan pencegahan, khususnya yang melibatkan masyarakat;
 - h. Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar, yang disebabkan: 1) belum semua Puskesmas terakreditasi; 2) Tenaga Medik Spesialis dan Sub Spesialis belum terpenuhi di RS; 3) Fasilitas Penunjang Pelayanan Medik belum terpenuhi; 4) Masih ada puskesmas yang belum melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional;
 - i. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi, disebabkan terbatasnya sarana prasarana (jaringan irigasi sekunder) yang tersedia; di sisi lain Menurunnya fungsi jaringan irigasi terbangun, disebabkan karena kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pengairan dan konservasi sumber daya air;
- b. Masih tingginya potensi bencana (tanah longsor, banjir, erosi dan abrasi pantai) pada daerah pesisir pantai dan sungai, disebabkan belum optimalnya konservasi daerah-daerah aliran sungai, kawasan pesisir pantai dan daerah rawan longsor;
- c. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sumber air minum aman, dikarenakan masih terbatasnya jaringan SPAM; di sisi lain jaringan SPAM terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas SPAM;
- d. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sanitasi layak, dikarenakan masih terbatasnya sistem air limbah domestik; di sisi lain fasilitas air limbah terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas air limbah;
- e. Masih banyak terdapat titik genangan pada saat hujan di kawasan perkotaan, disebabkan belum tersedianya sistem drainase perkotaan yang memadai;
- f. Masih terdapat pembangunan gedung tidak sesuai standar, dikarenakan terbatasnya pengawasan bangunan gedung;
- g. Belum optimalnya penyelenggaraan jaringan jalan untuk mendukung konektivitas wilayah, disebabkan belum seluruh jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, serta masih terdapat jalan dan jembatan rencana yang belum terbangun;
- h. Masih lemahnya tata kelola pengembangan jasa konstruksi daerah, yang disebabkan salah satunya belum tersedianya basis data jasa konstruksi yang memadai sesuai standar pelayanan minimal;

- i. Masih terdapat kawasan yang peruntukannya tidak sesuai dengan tata ruang, disebabkan belum tersedianya RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) dan RTRW revisi sesuai dengan kondisi terkini, serta belum optimalnya sistem informasi penataan.

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- a. Masih terdapat Kawasan Kumuh di Daerah Perkotaan, dikarenakan belum optimalnya penataan kawasan, PSU (prasarana, sarana dan utilitas) di daerah perkotaan serta belum tersedianya dokumen
- b. Perencanaan RP3KP;
- c. Belum terlaksananya penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat korban bencana;
- d. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dikarenakan kurang akuratnya basis data masyarakat berpenghasilan rendah.

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman lingkungan berbasis masyarakat, disebabkan kurangnya Pos Siskamling dan SDM santimas yang didukung sarana dan prasarana;
- b. Belum optimalnya penegakan Perda, disebabkan kurangnya SDM yang mempunyai sertifikasi PPNS, serta belum tersedianya sekretariat PPNS;
- c. Belum meratanya jangkauan pelayanan Satpol PP untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) di wilayah kerja, disebabkan kurang memadainya fasilitas pendukung pelayanan, serta jumlah personil Satpol PP;
- d. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya Kebakaran termasuk SDM yang mempunyai standar kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran.
- e. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana, disebabkan luasnya cakupan wilayah risiko bencana serta belum tersedianya rencana aksi pengelolaan risiko bencana di setiap kecamatan dan desa

SOSIAL

- a. Masih banyaknya masalah kesejahteraan sosial, disebabkan terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun Pembinaan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- b. Belum efektifnya upaya-upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA

- a. Kurangnya pembinaan dan pelatihan berbasis kompetensi dan keterampilan bagi pekerja maupun pencari kerja, disebabkan kurang tersedianya dan memadainya sarana dan prasarana latihan kerja di daerah;

- b. Masih banyak pencari kerja yang belum bekerja; di sisi lain kompetensi pekerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia yang menjadi indikasi kurangnya link-and-match antara lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja;
- c. Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan pekerja dengan perusahaan, disebabkan kurang efektifnya sosialisasi serta pembinaan dan pengawasan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

- a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang ditandai dengan masih terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- b. (KDRT) serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak, dikarenakan belum padunya kerangka kerja pemenuhan hak-hak anak pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha.

PANGAN

- a. Belum efektifnya tata kelola ketahanan pangan di daerah, disebabkan kurangnya Regulasi Ketahanan Pangan Daerah, serta kurang memadainya SDM Ketahanan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan Utama belum memadai, yang ditandai dengan masih tingginya Pasokan Pangan utama dari luar daerah (Beras); produksi pangan lokal belum mampu mendukung kebutuhan pangan daerah; belum meratanya pengelolaan distribusi pangan yang menyebabkan disparitas harga pangan antar wilayah;
- c. Belum terpenuhinya ketersediaan energi dan protein per kapita masyarakat, dikarenakan belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat, yang ditandai masih tingginya ketergantungan masyarakat pada beras (nasi) sebagai sumber karbohidrat, dan rendahnya konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal selain beras.

PERTANAHAN

- a. Masih terdapat Lahan milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, dikarenakan belum selesainya pengukuran lahan;
- b. Belum selesainya kasus sengketa tanah negara tahun 2019 antara
- c. Pemerintah Daerah dengan PTPN XIV Makasar;
- d. Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

LINGKUNGAN HIDUP

- a. Belum tersedianya regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dikarenakan belum diperdakannya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, dikarenakan belum dilakukannya pengawasan terhadap izin Lingkungan bagi Usaha yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten;

- c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, yang ditandai dengan masih banyaknya timbunan sampah yang belum terangkut, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana persampahan.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Belum optimalnya inovasi pelayanan kependudukan, yang ditandai dengan masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman eKTP, termasuk mutu pelayanan penerbitan KK, Akta Pencatatan Sipil, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal masih di atas 50%, disebabkan masih lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, belum efektifnya sistem pendataan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan; terbatasnya kapasitas PADes dikarenakan masih adanya tumpang tindih kewenangan Desa dan Kabupaten dalam pungutan PADes; serta belum berkembangnya BUMDes dan usaha ekonomi produktif di desa;
- b. Belum adanya desa berstatus mandiri, disebabkan belum adanya kerangka kerja terpadu yang melibatkan lintas sektor untuk pengembangan kawasan desa mandiri.

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Meningkatnya Total Fertility Rate (TFR), disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB, serta masih tingginya unmet need KB.

PERHUBUNGAN

- a. Meningkatnya kasus kecelakaan LLAJ, yang diantaranya disebabkan belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu jalan, markah jalan, guardrail);
- b. Masih rendahnya tingkat pelayanan di terminal angkutan darat, disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib di terminal, kurangnya memadainya SDM pengelola terminal, terbatasnya fasilitas terminal, serta belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan terminal;
- c. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, yang ditandai dengan masih kurangnya rasio ijin trayek untuk melayani kebutuhan pelayanan angkutan umum;
- d. Belum efisien dan efektifnya layanan pelaksanaan uji kir, dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas dan SDM bidang transportasi, fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum berfungsi dengan baik, serta pelaksanaan uji kir terhadap fisik kendaraan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP pengujian kendaraan bermotor;
- e. Belum optimalnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, termasuk masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Masih rendahnya informasi pelayanan publik kepada masyarakat, disebabkan belum tersedianya media komunikasi publik pemda yang memadai, belum tersedianya kelompok informasi masyarakat, serta rendahnya kapasitas SDM komunikasi publik;
- b. Belum memadainya sistem informasi pemerintah berbasis elektronik, yang ditandai dengan belum seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi, belum semua perangkat daerah memiliki sub domain, masih kurangnya tenaga IT, serta infrastruktur jaringan yang belum memadai;
- c. Masih terdapat wilayah/desa yang belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi/internet.

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- a. Minimnya pertumbuhan koperasi, yang ditengarai karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi;
- b. Masih banyak koperasi yang tidak aktif, dikarenakan koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal, serta terbatasnya
- c. SDM koperasi;
- d. c) Rendahnya kualitas produk usaha mikro, dikarenakan sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional dan keterbatasan modal usaha.

PENANAMAN MODAL

- a. Menurunnya minat Investor di kabupaten Halmahera Utara, disebabkan kurangnya fasilitas insentif penanaman modal, terbatasnya sarana informasi penanaman modal, kurang lengkapnya basis data penanaman modal, belum tersedianya rencana umum penanaman modal (RUPM), serta minimnya promosi investasi daerah;
- b. Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, disebabkan belum memadainya SDM dan fasilitas pelayanan.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- a. Belum optimalnya pengembangan daya saing kepemudaan, disebabkan kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan;
- b. Belum optimalnya pengembangan daya saing keolahragaan, disebabkan kurangnya pembinaan bagi klub olahraga, terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta SDM olahraga dalam sentra pendidikan seperti guru olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. Kurangnya pembinaan organisasi kepramukaan, disebabkan semakin menurunnya minat masyarakat terhadap gerakan pramuka, serta kurangnya pengembangan kapasitas SDM kepramukaan.

STATISTIK

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dikarenakan masih lemahnya penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.

PERSANDIAN

- a. Masih lemahnya tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pmda, disebabkan belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai serta kurangnya sumberdaya sandiman, serta belum fokusnya penyelenggaraan urusan persandian sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar.

KEBUDAYAAN

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian seni budaya, serta benda cagar budaya di daerah.

PERPUSTAKAAN

- a. Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan, disebabkan kurangnya kesadaran Pemerintah Desa/Masyarakat terhadap pengembangan
- b. Perpustakaan di Desa;
- c. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;
- d. Belum adanya upaya pelestarian Naskah Kuno.

KEARSIPAN

- a. Masih terdapat perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku, disebabkan terbatasnya SDM kearsipan, serta kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan Arsip Statis perangkat daerah kepada Lembaga Kearsipan;
- b. Masih lemahnya Penerapan SOP dan Perda tentang Kearsipan, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap SOP dan Perda tentang Kearsipan di Daerah.

C. URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Belum optimalnya produksi perikanan, disebabkan terbatasnya jumlah armada tangkap untuk penangkapan jarak jauh (lebih besar dari 12 mil); serta keterampilan SDM perikanan tangkap jarak jauh;
- b. Masih rendahnya produksi perikanan budidaya, disebabkan kurang memadainya sarana produksi perikanan budidaya air tawar, meliputi antara lain benih dan pakan.

PARIWISATA

- a. Masih rendahnya kunjungan pariwisata di daerah dibandingkan dengan kawasan sekitar seperti Bitung Sulawesi Utara dan Raja Ampat Papua Barat, disebabkan kurangnya promosi pariwisata, terbatasnya kapasitas pelaku pariwisata yang umumnya masih dalam skala rumah tangga,

- tidak adanya pusatt Informasi pariwisata/TIC, belum adanya Biro Perjalanan wisata, Tour Operator yang menjual paket wisata di Halmahera Utara;
- b. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, disebabkan kurangnya insentif Pengelola (fasilitas banyak yang sudah rusak, terabaikan), kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan laut, lingkungan destinasi wisata, dan terumbu karang;
 - c. Kurang berkembangnya ekonomi kreatif yang dapat mendukung usaha pariwisata, yang ditandai dengan belum adanya kios cenderamata yang dapat menampung hasil kerajinan khas daerah; serta masih kurangnya minat generasi muda dalam berkreasi, berinovasi dan berkarya terhadap hasil kerajinan ekonomi kreatif.

PERTANIAN

- a. Belum optimalnya produksi pertanian/peternakan, yang disebabkan terbatasnya sarana produksi pertanian/peternakan meliputi bibit/benih serta belum memadainya sarana di Balai Penyuluhan Pertanian, Puskesmas, instalasi pembibitan; kurangnya penangkar benih yang bersertifikasi; serta kurangnya prasarana pertanian meliputi (jaringan irigasi usaha tani, Pintu Air, jalan usaha tani/produksi, Alat dan mesin pertanian, Puskesmas, instalasi pembibitan);
- b. Belum optimalnya pengelolaan produk pertanian, yang disebabkan terbatasnya fasilitas pengolahan hasil pertanian yang bersertifikasi;
- c. Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, dikarenakan kurangnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; belum tersedianya fasilitas pengolahan hasil peternakan yang bersertifikasi, serta kurangnya fasilitas di RPH;
- d. Belum optimalnya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, disebabkan kurangnya Petugas POPT di kecamatan;
- e. Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian/peternakan, disebabkan terbatasnya fasilitasi pelatihan bagi petani/peternak dan petugas meliputi
- f. (Magang, bimtek, workshop, diklat teknis).

KEHUTANAN

- a. Belum berjalannya upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura).

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), yang ditandai dengan belum adanya fasilitas pembangkit tenaga listrik bersumber EBT, serta belum memadainya sarana penerangan jalan umum bersumber EBT.

PERDAGANGAN

- a. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;

- b. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meliputi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- c. Masih rendahnya volume maupun nilai produk ekspor daerah.

PERINDUSTRIAN

- a. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil;
- b. Masih rendahnya kapasitas industri yang memiliki standar produksi layak.

TRANSMIGRASI

- a. Terhambatnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi baru, disebabkan belum adanya pengalihan status kawasan hutan/izin prinsip merujuk pada calon kawasan tidak masuk dalam Areal Penggunaan Lain
- b. (APL) tetapi masuk di Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- c. Belum terealisasinya pengembangan Kawasan Transmigrasi, disebabkan belum adanya pengalihan status HPK ke APL untuk perluasan kawasan transmigrasi;
- d. Belum berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM), disebabkan masih rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan untuk pembangunan KTM yang berdampak pada pengembangan kawasan transmigrasi.

D. UNSUR PENDUKUNG, PENUNJANG DAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN, KEWILAYAHAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

- a. Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disebabkan belum adanya instrumen internal yang baku untuk memfasilitasi pendampingan dan pengawasan pelaporan akuntabilitas kinerja dari setiap perangkat daerah;
- b. Masih minimnya jumlah kerjasama daerah yang dapat mendorong peningkatan investasi, perdagangan antar daerah, dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SEKRETARIAT DPRD

- a. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

PERENCANAAN

- a. Belum konsistennya penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, yang disebabkan: minimnya SDM aparatur perencana, belum efektifnya proses pengendalian perencanaan, belum optimalnya analisis data dan informasi (data PD yang belum valid), kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan Teknologi
- b. Informasi dalam perencanaan;

- c. Masih kurangnya capaian target perencanaan, yang disebabkan: penetapan target yang terlalu tinggi tanpa dilandasi metode/asumsi yang kuat, serta indikator yang belum memenuhi unsur SMART.

KEPEGAWAIAN

- a. Belum optimalnya manajemen Disiplin Aparatur merujuk pada belum adanya Sistem Pengawasan Disiplin dan Pengawasan Kinerja, yang disebabkan antara lain belum tersedianya aplikasi Presensi Kehadiran Pegawai selama jam kerja secara real time dan aplikasi pemantauan kinerja berjenjang secara harian, bulanan dan tahunan yang efektif dan efisien;
- b. Belum efektifnya kinerja pemerintah daerah merujuk pada masih adanya jabatan struktural maupun fungsional yang belum seluruhnya terisi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, yang disebabkan antara lain: belum lengkapnya data Talent/Profil Pegawai untuk keperluan suksesi, rotasi dan promosi, serta belum dimilikinya Assessment Centre secara mandiri untuk Penilaian Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Bagi setiap Jabatan yang diperlukan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi aparatur dalam tugas dan fungsi, baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokultural, yang disebabkan kurangnya pengembangan kompetensi bagi aparatur secara berkelanjutan sesuai tupoksi sejalan dengan dinamika permasalahan daerah, dan belum terkelolanya dengan baik pengembangan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan organisasi/daerah;
- b. Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi manajerial kepemimpinan pejabat struktural merujuk masih banyaknya pejabat struktural yang belum memiliki sertifikat Diklat PIM, sebagai bagian persyaratan kompetensi jabatan, yang disebabkan batalnya pelaksanaan diklat kepemimpinan selama beberapa tahun terakhir karena berbagai kendala dan kurangnya minat pejabat struktural untuk mengikuti diklat karena waktu diklat yang lama dan lokasi kegiatan yang diluar daerah.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- a. Masih minimnya produk/hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan daerah.

INSPEKTORAT DAERAH

- a. Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya sesuai standar, dikarenakan
- b. SOP belum memadai;
- c. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama teknis dengan aparat pengawas lainnya, merujuk pada masih minimnya tindaklanjut Kesepakatan kerja sama secara teknis dan operasional antara APIP dan
- d. APH lainnya;

- e. Masih kurangnya ketersediaan Tenaga APIP bersertifikat, sarana/ prasarana penunjang pengawasan yang memadai, disebabkan anggaran pengawasan yang belum sesuai dengan mandatori;
- f. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan inspektorat;
- g. Hasil pemeriksaan APIP Maupun Pengawasan Eksternal (BPK) belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh para penanggungjawab, disebabkan Penanggung jawab temuan sulit untuk ditemui, meninggal, atau mutasi ke luar daerah.

KECAMATAN

- a. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa, disebabkan narkoba, tawuran, serta perselisihan tapal batas desa;
- b. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa, disebabkan rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan Desa dan seringnya pergantian perangkat desa;
- c. Masih kurangnya usaha ekonomi produktif desa merujuk pada masih banyaknya desa yang belum terbentuk BUMDes.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Masih adanya potensi konflik di Masyarakat;
- b. Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahun atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, Perencanaan kinerja juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (periode 5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun).

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1.1. Visi & Misi

Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Halmahera Utara yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu pada tahun 2026. RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Oleh karena itu perumusan visi RPJMD juga mempertimbangkan acuan-acuan dimaksud. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

Tabel 6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

VISI
TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA UTARA
MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN INVESTASI
DALAM KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Misi : 1 Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya adalah Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, dengan indikator kinerja	1) Indeks Kesehatan Daerah 2) Indeks Pendidikan Daerah
		Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	1) Indeks Pembangunan Gender 2) Indeks Ketahanan Sosial
Misi : 2 Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya: Indeks Perkembangan Wilayah	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	1) Indeks Pembangunan Infrastruktur

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	1) Indeks Ketahanan Lingkungan
Misi 3 : Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya: Laju pertumbuhan ekonomi; Pendapatan per Kapita; dan Indeks Rasio Gini	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	1) Pertumbuhan investasi PMTB 2) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan 3) Pertumbuhan PDRB Pariwisata 4) Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan 5) Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha usaha ekonomi produktif dan kreatif	1) Indeks Ketahanan Ekonomi 2) Tingkat Kemiskinan
Misi : 4 Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya: Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	1) Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)

Makna kata yang terkandung dalam Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. **Kesejahteraan Masyarakat** : kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya Kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu

memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya Kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

2. **Pembangunan Berkelanjutan** : merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. **Inovasi** : pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.
4. **Investasi** : Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability). Struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara didominasi sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan sektor industri pengolahan dan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk bekerja masih memiliki tingkat produktivitas rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Usaha-usaha kecil dan menengah yang berkontribusi cukup signifikan pada perekonomian daerah menjadi salah satu sektor paling terdampak dari adanya Pandemi Covid- 19. Pariwisata merupakan salah satu sektor

yang sangat prospektif merujuk pada melimpahnya potensi destinasi wisata, namun belum cukup berdaya saing untuk menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara kedepan harus mendorong transformasi peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern (industri) dan kreatif. Transformasi struktural akan memberikan kesempatan kerja yang semakin bertambah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, stok modal, penggunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Transformasi struktur ke arah industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini peningkatan investasi produktif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah menjadi prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural.

5. **Kebersamaan yang Berkeadilan :** Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan inklusif tidak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Pembangunan inklusif atas dasar kebersamaan dan berkeadilan bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pembangunan inklusif di Kabupaten Halmahera Utara merupakan komitmen bersama untuk penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

2.1.2. Program

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 7. Program Pengendalian Penduduk 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 10. Program Pengelolaan Pendidikan 11. Program Pengembangan Kurikulum 12. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 13. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 14. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 1.853.704.776.171
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program Perlindungan Khusus Anak 7. Program Pembinaan Perpustakaan 8. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 11. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 12. Program Pemberdayaan Sosial 13. Program Rehabilitasi Sosial 14. Program Penanganan Bencana 15. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 16. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	Rp. 73.321.641.607

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4
		Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 17. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 18. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 19. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 20. Program Pengembangan Kebudayaan 21. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 22. Program Pembinaan Sejarah 23. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 24. Program Pengelolaan Permuseuman	
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 4. Program Pengelolaan Persampahan Regional 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengembangan Permukiman 7. Program Penataan Bangunan Gedung 8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 11. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 12. Program Penyelenggaraan Jalan 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 14. Program Pengelolaan Pelayanan 15. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 749.183.570.749
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 167.381.333.427

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4
		5. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 11. Program Pengelolaan Persampahan 12. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 13. Program Penanggulangan Bencana	
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Program Perizinan Usaha Pertanian 6. Program Penyuluhan Pertanian 7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 9. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 11. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 12. Program Promosi Penanaman Modal 13. Program Pelayanan Penanaman Modal 14. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 15. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 16. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 17. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp. 158.738.831.320

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4
		18. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 19. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 20. Program Pemasaran Pariwisata 21. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 22. Program Perencanaan Tenaga Kerja 23. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 24. Program Penempatan Tenaga Kerja 25. Program Hubungan Industrial	
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 7. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 8. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 11. Program Pengembangan UMKM 12. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 13. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 14. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 15. Program Pengembangan Ekspor 16. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 17. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 18. Program Penataan Desa 19. Program Peningkatan Kerjasama Desa 20. Program Administrasi Pemerintahan Desa 21. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 22. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 74.740.999.410

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4
		23. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 24. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 25. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
7	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Perekonomian dan Pembangunan 4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 7. Program Pengelolaan Arsip 8. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 9. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 10. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 11. Program Pendaftaran Penduduk 12. Program Pencatatan Sipil 13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 14. Program Peningkatan tkt dan Ketertiban Umum 15. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 16. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 17. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 18. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 19. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 22. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 23. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 942.033.190.161

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4
		24. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 25. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 26. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 27. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 28. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 29. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30. Program Penyelenggaraan Pengawasan 31. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, dengan indikator kinerja	Indeks Kesehatan Daerah	%	78,44
		Indeks Pendidikan Daerah	%	72,22
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	89,65
		Indeks Ketahanan Sosial	%	66,7
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	75,95
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	69,91
5		Pertumbuhan investasi PMTB	%	4,62

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	%	4,43
		Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	2,48
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	12,58
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,86
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	44,83
		Tingkat Kemiskinan	%	3,89
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan,	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)	%	24,6



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Secara garis besar pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	2,5	28,57
2	Baik (B)	1,3,4,6	57,14
3	Cukup (C)	7	14,29
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		7	100

3.2. EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2022

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2022 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 10
Efisien Program dan Pendanaan Tahun 2022

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien (E)
3	55% s/d 75%	Kurang Efisien (KE)
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien (TE)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta

mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tergambar dalam Tabel berikut:

Tabel 11
Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2022

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Efisien (SE)	1,2,3,4,5,6,7	100
2	Efisien (E)	-	-
3	Kurang Efisien (KE)	-	-
4	Tidak Efisien (TE)	-	-
Jumlah		7	100

Dengan demikian secara umum pencapaian sasaran melalui program dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 dinilai **Sangat Efisien (SE)**. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta efisiensi program dan pendanaan lebih lanjut akan disajikan dalam sub bab berikut.

3.3. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Tabel 12
Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, dengan indikator kinerja	Indeks Kesehatan Daerah	%	78,44	76.73	97.82
		Indeks Pendidikan Daerah	%	72,22	66.73	92.40
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	89,65	89.73	100.09
		Indeks Ketahanan Sosial	%	66,7	67.05	100.52
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	75,95	74,72	98,38

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	69,91	68,73	98,31
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB	%	4,62	23,34	505,19
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	%	4,43	0,52	11,74
		Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	2,48	2,75	110,89
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	12,58	2,20	17,49
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,86	6,06	75,31
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	44,83	42,64	95,11
		Tingkat Kemiskinan	%	3,89	4,58	82,26
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan,	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)	%	24,6	13,96	56,75

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:

Sasaran 1 :

MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN, TARAF PENDIDIKAN DAN KESEMPATAN BELAJAR MASYARAKAT, DENGAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator yang diusung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Hasil pengukuran menunjukkan 2 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **95,11%**.

Tabel 13
Sasaran Strategis 1

No	Indikator	2021			2022			Perbandingan		Jangka Menengah 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Kesehatan Daerah	78.31	76.32	97.46	78.44	76.73	97.82	0.36	0.41	78.99

No	Indikator	2021			2022			Perbandingan		Jangka Menengah 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
2	Indeks Pendidikan Daerah	71.19	66.54	93.47	72.22	66.73	92.40	-1.07	0.19	76.33
Rata-rata							95.11			

a. Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Kesehatan Daerah

Indeks Kesehatan Daerah adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks Kesehatan Daerah dibentuk oleh Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Hidup Maksimal (AHH_{Max}) dan Angka Harapan Hidup Minimal (AHH_{Min}). Ketiga indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas Kesehatan masyarakat di Halmahera Utara.

Angka Harapan Hidup (AHH) dapat didefinisikan sebagai Harapan Umur Kehidupan (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh setiap orang sampai usia 69,88 dari Angka Harapan Hidup Maksimal (AHH_{Max}) 85 tahun sedangkan Angka Harapan Hidup Minimal (AHH_{Min}) adalah 0 tahun. AHH dapat digunakan untuk mengetahui Indeks Kesehatan Masyarakat di Halmahera Utara. Untuk tahun 2022 Indeks Kesehatan Daerah sebesar 76,73 dari target yang ditetapkan sebesar 78,44, , dari hasil tersebut maka pencapaian Indeks Kesehatan Daerah Tahun 2022 masih lebih rendah 1,71 dari target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 78,99%, dan Jika diperbandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 76,32 maka realisasi tahun 2022 lebih tinggi 0,41 Jika diperbandingkan dengan Capaian Realisasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 sebesar 80,93 yang berarti bahwa Indeks kesehatan Daerah Halmahera Utara lebih rendah 4,2. Dan jika diperbandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 sebesar 78,99%, maka Indeks Kesehatan Daerah (IKD) masih memiliki selisih rendah sebesar 2,26%. Dari Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa belum capai target tetapi selisih sedikit atau kecil.

Jika dianalisis Faktor-faktor kegagalan pencapaian target IKD maka diantaranya karena:

1) Masih Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar , karena ada beberapa Puskesmas yang belum terakreditasi dari total 19 Puskesmas baru 14 Puskesmas yang terakreditasi (sumber data : LKj Dinas kesehatan Halmahera Utara, tahun 2022);

2) Masih ada masyarakat yang belum menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Karena itu sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

1. Melakukan Proses Akreditasi bagi Puskesmas yang belum Akreditasi;
2. Meningkatkan Koordinasi dan penguatan peran lintas sektor;

3. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, dan melaksanakan kampanye perilaku Hidup bersih dan sehat melalui Gerakan masyarakat hidup sehat.

2. Indeks Pendidikan Daerah

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks pendidikan dibentuk oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7-24 tahun karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sedangkan Rata-rata Lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 adalah sebesar 13,67 tahun berada pada urutan ke-3 sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah sebesar 8,63 tahun atau berada pada urutan ke-5 dari 10 Kabupaten/kota di Maluku Utara. Berdasarkan data RLS dan HLS maka dapat dihitung Indeks Pendidikan Daerah (IPD) untuk Kabupaten Halmahera Utara di tahun 2022 adalah sebesar 66,74 % yang artinya bahwa 66,74% penduduk kabupaten Halmahera Utara pada usia 24 tahun keatas telah ada pada tingkat pendidikan antara SMP kelas 2 dan 3 (RLS 8,63) dengan harapan lama sekolahnya 13,67 Tahun. Jika dibandingkan dengan IPD tahun 2021 sebesar 66,54 % maka di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,20 %. dan jika dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota di Maluku Utara maka Indeks Pendidikan Daerah Halmahera Utara masih berada pada urutan ke-5 dari Kota Ternate, Kota Tidore, kepulauan sula dan Halmahera tengah, dan masih dibawah Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara yaitu 68,94 %. Tetapi lebih tinggi 0,69 % dari IPD Nasional 66,05%.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 76,33 %, maka Indeks Pendidikan Daerah (IPD) masih memiliki selisih rendah sebesar 9,59 %. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IPD diantaranya adalah Rendahnya Angka Rata-rata Lama sekolah, hal ini disebabkan karena masih ada masyarakat yang putus sekolah/tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dapat dilihat dari angka melanjutkan sekolah SD ke SMP/Mts tahun 2021 sebesar 94,28% atau masih 6,7% yang tidak melanjutkan sekolah atau melanjutkan sekolah di kabupaten lainnya. Karena itu dibutuhkan berbagai upaya untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan ke masyarakat;
- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 45 tahun ke atas;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru serta sekolah pada daerah-daerah yang terpencil;

- meningkatkan rasio ketersediaan sekolah maupun guru pada jenjang pendidikan dasar melalui pembangunan infrastruktur

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan Indeks Kesehatan Daerah (IKD) dan Indeks Pendidikan Daerah (IPD) adalah melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Pengelolaan Pendidikan

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut Rp. 189.190.706.950 terealisasi sebesar Rp. 101.927.685.440 atau sebesar 53,88% (terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp. 109.739.324.700 terealisasi Rp. 59.318.923.410 atau 54.05% dan Dinas anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp. 79.451.382.250 terealisasi sebesar Rp. 42.608.762.030 atau 53.63%) Nilai efisiensi capaian dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **95,11%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **53,88%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **176,55%**, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran 2 :

MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER SERTA KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator yang diusung oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial. Hasil pengukuran menunjukan 2 indikator memiliki capaian Kinerja **Baik Sekali** dengan persentase **100,31%**.

Tabel 14
Sasaran Strategis 2

No	Indikator	2021			2022			Perbandingan		Jangka Menengah 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Gender	89.55	89.35	99.77	89.65	89.73	100.09	0.32	0.38	78,99
2	Indeks Ketahanan Sosial	65.77	65.58	99.71	66.70	67.05	100.52	0.81	1.47	76,33
Rara-rata							100.31			

a. **Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran**

1. **Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks Pembangunan Gender dibentuk oleh Indeks Pembangunan Perempuan (IPM Perempuan) dan Indeks Pembangunan Perempuan (IPM Laki-Laki). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas pembangunan gender. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15
Indeks Pembangunan manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin			
	Laki-laki		Perempuan	
	2021	2022	2021	2022
MALUKU UTARA	73.88	74.35	66.31	67.14
Halmahera Barat	70.3	70.77	62.2	62.91
Halmahera Tengah	69.93	70.45	62.78	63.53
Kepulauan Sula	67.66	68.42	62.49	63.47
Halmahera Selatan	69.12	70.05	60.34	61.21
Halmahera Utara	73.13	73.58	65.34	66.02
Halmahera Timur	72.68	73.44	59.28	60.29
Pulau Morotai	68.8	69.61	47.99	49.32
Pulau Taliabu	66.83	67.51	55.66	56.58
Kota Ternate	83.67	84.12	76.87	77.63
Kota Tidore Kepulauan	73.52	74.02	70.46	71.09
INDONESIA	76.25	76.73	69.59	70.31

Sumber Data: <https://www.bps.go.id/indicator/40/462/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-jenis-kelamin.html>

Indeks Pembangunan Gender memiliki kriteria pembentuk yang sama dengan IPM, hanya saja IPG mempersandingkan kondisi laki-laki dan perempuan namun IPG secara spesifik merumuskan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 adalah 89,73 mengalami peningkatan 0,08 dari Target yang ditetapkan sebesar 89,65, jika diperbandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 89,35 mengalami peningkatan 0,38. Jika diperbandingkan dengan Kabupaten di Maluku Utara posisi Kabupaten Halmahera Utara berada di antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Barat dimana Kabupaten Halmahera Utara berada di posisi ketiga. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 90,02, maka Indeks Pembangunan Gender Daerah (IPG) masih terdapat selisih sebesar 0,29 %. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 16
Indeks Pembangunan Gender Daerah (IPG)

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	2021	2022
MALUKU UTARA	89.75	90.30
Halmahera Barat	88.48	88.89
Halmahera Tengah	89.78	90.18
Kepulauan Sula	92.36	92.77
Halmahera Selatan	87.3	87.38
Halmahera Utara	89.35	89.73
Halmahera Timur	81.56	82.09
Pulau Morotai	69.75	70.85

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	2021	2022
Pulau Taliabu	83.29	83.81
Kota Ternate	91.87	92.28
Kota Tidore Kepulauan	95.84	96.04
INDONESIA	91.27	91.63

Sumber Data: <https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>

Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Utara meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai yang dicapai melebihi capaian Maluku Utara (90.30) dan Indonesia (91.63). Ini menunjukkan IPG semakin mendekati IPM dan kesenjangan gender Maluku Utara dan Indonesia Lebih baik dari Halmahera Utara. Dimana Pembentuk Indeks Pembangunan Gender adalah : (1) Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Rata-rata Harapan Lama Sekolah (RHLS) dan Pengeluaran Rata-rata perkapita. Angka harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Harapan hidup saat lahir dapat diperkirakan dalam situasi tertentu. Harapan hidup meningkat setelah kelangsungan hidup anak di tahun-tahun awal, dan kehidupan itu harapan saat lahir bukanlah usia rata-rata pada yang orang dewasa meninggal (Zakrzewski 2015). Angka Harapan Hidup menurut jenis kelamin Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya, yaitu angka harapan hidup laki-laki pada tahun 2021 sebesar 74,95 tahun, meningkat menjadi sebesar 75,32 tahun pada tahun 2022. Sama halnya dengan perempuan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 71,54 Tahun naik menjadi 71,84 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Table 17
AHH laki-Laki dan Perempuan Kab. Halmahera Utara 2021 – 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2021	2022	2021	2022
MALUKU UTARA	66.55	66.84	70.44	70.79
Halmahera Barat	64.37	64.63	68.22	68.54
Halmahera Tengah	62.24	62.5	66	66.48
Kepulauan Sula	61.45	61.68	65.23	65.55
Halmahera Selatan	63.97	64.22	67.79	68.09
Halmahera Utara	67.60	67.82	71.54	71.84
Halmahera Timur	67.11	67.51	71	71.44
Pulau Morotai	65.33	65.65	69.25	69.66
Pulau Taliabu	60.31	60.56	64.04	64.37
Kota Ternate	69.08	69.35	72.95	73.28
Kota Tidore Kepulauan	67.46	67.74	71.33	71.65
INDONESIA	69.67	69.93	73.55	73.83

Sumber Data: Diolah dari data BPS 2020

Data tersebut menunjukkan AHH laki-laki Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah dibandingkan perempuan. Capaian AHH laki-laki dan Perempuan Kabupaten Halmahera Utara

mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 AHH Laki-laki (67.60) dan AHH Perempuan (71.54). Jika diperbandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, AHH Laki-laki dan Perempuan Halmahera Utara Lebih Tinggi dari AHH Laki-Laki dan Perempuan Provinsi Maluku Utara, dan jika diperbandingkan dengan skala nasional maka Capaian AHH Laki-Laki dan perempuan Halmahera Utara lebih rendah dari skala nasional AHH Laki-laki (nilai yang dicapai melebihi capaian Maluku Utara AHH Laki-Laki (66.84), AHH Perempuan (70.79). Jika diperbandingkan dan Indonesia AHH laki-Laki (91.63) dan AHH Perempuan (73.83).

2) Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (RHLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2021 hingga tahun 2022 masing-masing mengalami perkembangan peningkatan. Berdasarkan HLS laki-laki pada tahun 2021 sebesar 13.70 tahun meningkat menjadi sebesar 13.71 tahun pada tahun 2022. Sedangkan HLS Perempuan pada tahun 2021 sebesar 13.38 tahun meningkat 13.54 pada tahun 2022. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 - 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2021	2022	2021	2022
MALUKU UTARA	13.73	13.74	13.68	13.73
Halmahera Barat	13.07	13.20	13.28	13.29
Halmahera Tengah	13.13	13.14	13.10	13.29
Kepulauan Sula	12.97	12.98	12.76	12.95
Halmahera Selatan	12.82	13.08	12.75	12.89
Halmahera Utara	13.70	13.71	13.38	13.54
Halmahera Timur	13.08	13.09	12.63	12.81
Pulau Morotai	12.42	12.65	12.93	12.97
Pulau Taliabu	12.49	12.50	12.65	12.86
Kota Ternate	15.63	15.64	15.88	15.89
Kota Tidore Kepulauan	14.17	14.18	14.74	14.88
INDONESIA	12.95	12.96	13.22	13.28

Data Harapan Lama Sekolah tahun 2022 untuk laki-laki sebesar 13,71 tahun berada di bawah rata-rata laki laki Provinsi Maluku Utara sebesar 13.74 tahun, serta berada di posisi pertama tertinggi antara kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Harapan Lama Sekolah Perempuan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 sebesar 13.54 tahun di bawah Harapan Lama Sekolah Perempuan Provinsi Maluku Utara sebesar 13.73 serta berada di posisi pertama tertinggi antara kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Jika diperbandingkan dengan skala nasional maka HLS Laki-laki dan perempuan Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah.

Berkaitan dengan Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan jenis kelamin tahun 2021 hingga tahun 2022 posisi laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah laki-laki pada tahun 2021 sebesar 13.70 tahun naik menjadi sebesar 13.71 tahun 2022 dan perempuan tahun 2021 sebesar 13.38 tahun naik menjadi sebesar 13.54 tahun 2022.

3) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Berkaitan dengan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan jenis kelamin tahun 2021 hingga tahun 2022 posisi laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah laki-laki pada tahun 2021 sebesar 9.20 tahun naik menjadi sebesar 9.21 tahun 2022 dan perempuan tahun 2021 sebesar 8.03 tahun naik menjadi sebesar 8.05 tahun 2022. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Provinsi/Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2021	2022	2021	2022
MALUKU UTARA	9.5	9.51	8.67	8.93
Halmahera Barat	9.06	9.07	8.12	8.4
Halmahera Tengah	9.52	9.53	8.71	8.8
Kepulauan Sula	9.36	9.37	8.74	8.82
Halmahera Selatan	8.51	8.53	7.59	7.79
Halmahera Utara	9.20	9.21	8.03	8.05
Halmahera Timur	8.79	9.00	7.95	8.2
Pulau Morotai	8.00	8.02	6.92	6.94
Pulau Taliabu	8.04	8.31	7.31	7.61
Kota Ternate	12.26	12.33	11.35	11.69
Kota Tidore Kepulauan	10.46	10.47	9.78	9.79
INDONESIA	8.92	8.99	8.17	8.39

Sumber Data: <https://www.bps.go.id/indicator/40/459/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html>

Posisi rata-rata lama sekolah tahun 2022 untuk laki-laki sebesar 89.21 tahun berada di bawah rata-rata laki-laki Provinsi Maluku Utara 9.51 tahun serta posisi ketiga tertinggi setelah kabupaten Halmahera Tengah 9.53 tahun dan Kabupaten Kepulauan Sula 9.37 tahun. Dan Jika dibandingkan dengan RLS Laki-Laki Skala Nasional 8.99 tahun, artinya RLS Laki - laki Kabupaten Halmahera Utara lebih tinggi dari skala nasional. Rata-rata lama sekolah untuk perempuan Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 sebesar 8,05 tahun, berada di bawah rata-rata perempuan Provinsi Maluku Utara 8.93 tahun dan berada diantara Halmahera Timur 8.20 tahun dan Halmahera Selatan 7,79 tahun. Dan Jika dibandingkan dengan RLS Perempuan Skala Nasional 8.39 tahun, artinya RLS Perempuan Kabupaten Halmahera Utara lebih tinggi dari skala nasional.

4) Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita

Pengeluaran Rata-Rata Perkapita tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan, yaitu untuk laki-laki pada tahun 2021 sebesar Rp. 11.291 ribu naik menjadi sebesar Rp. 11.656 ribu pada tahun 2022 berada dibawah Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Laki-laki Provinsi Maluku Utara Rp. 12.722. Dan Jika dibandingkan dengan Skala Nasional Rp. 16.215, artinya Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Laki-Laki Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah dari skala nasional. Sedangkan untuk perempuan mengalami peningkatan dari Rp. 6.685 ribu di tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 6.904 ribu pada tahun 2022 berada dibawah Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Perempuan Provinsi Maluku Utara Rp. 7.176. Dan Jika dibandingkan dengan Skala

Nasional Rp. 9.281, artinya Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Perempuan Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah dari skala nasional. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2021	2022	2021	2022
MALUKU UTARA	12,339	12,722	6,964	7,176
Halmahera Barat	10,782	11,008	5,801	5,925
Halmahera Tengah	10,924	11,343	6,405	6,550
Kepulauan Sula	9,371	9,970	6,609	6,956
Halmahera Selatan	10,697	11,284	5,512	5,695
Halmahera Utara	11,291	11,656	6,685	6,904
Halmahera Timur	12,377	12,758	4,443	4,578
Pulau Morotai	10,753	11,202	2,363	2,514
Pulau Taliabu	11,240	11,495	4,443	4,544
Kota Ternate	17,701	18,099	10,428	10,647
Kota Tidore Kepulauan	9,842	10,160	7,996	8,247
INDONESIA	15,770	16,215	9,050	9,281

Karena itu dibutuhkan kerja ke untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Peningkatan kegiatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
- Peningkatan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- Peningkatan kegiatan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
- Peningkatan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, melalui: koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta advokasi kebijakan, penyediaan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan.

Analisis Kinerja (Faktor Keberhasilan dan Kegagalan)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di di Maluku Utara pada tahun 2022 Halmahera Utara menempati posisi ketiga dengan nilai IPG yang mencapai sebesar 89.73. Capaian nilai IPG yang mendekati angka 100 tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan gender sudah cukup rendah di Halmahera Utara, dan capaian tersebut masih dapat di tingkatkan lagi. Upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan mewujudkan pembangunan manusia yang berfokus pada kesetaraan gender itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Gender. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara selama beberapa tahun terakhir mengalami fase naik turun. Terjadinya fase ini pada IPG Halmahera Utara, berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya, yang berarti pemerintah Halmahera Utara masih kesulitan dalam menghadapi permasalahan indeks pembangunan. Maka dari itu, perlu dilakukannya analisis lebih mendalam dalam menentukan

faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap IPG di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022. Berdasarkan uraian deskriptif diatas maka Hasil yang didapatkan bahwa faktor yang paling memberi pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Halmahera Utara tahun 2021-2022 adalah Angka harapan Hidup (AHH) Laki -Laki dan Perempuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki hubungan erat dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan tingkat partisipasi Partisipasi Angkatan Kerja yang berkontribusi terhadap Pengeluaran Rata-Rata Perkapita. IPG di Halmahera Utara akan mengalami peningkatan apabila HLS semakin tinggi dan semakin rendah RLS dan Pengeluaran Rata-Rata Perkapita maka IPG akan mengalami peningkatan.

2. Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Indeks Ketahanan Sosial merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Desa Membangun (IDM).

Ketahanan sosial adalah suatu proses dinamis yang mencakup sekelompok gejala yang menuntut penyesuaian diri yang berhasil terhadap sejumlah ancaman yang signifikan dalam perkembangan kehidupan dan hasil-hasil lainnya yang dicapai dalam perjalanan kehidupan (Fraser & Galinsky, 2004). Sedangkan konsep ketahanan sosial masyarakat terdapat di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2006 yang mendefinisikan ketahanan sosial masyarakat sebagai suatu kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa suatu komunitas memiliki ketahanan sosial bila (a) mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari perubahan sosial; (b) mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial, (c) mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan; (d) mampu mengembangkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. (Kepmensos No. 12/HUK/2006).

Meningkatnya kualitas Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi) menjadi tolak ukur dalam menentukan status desa dalam IDM.

Kecamatan	Desa Menurut Kategori IDM 2022					IDM Kecamatan 2022						2021	
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sgt Tertinggal	IKS	IKE	IKL	Total	Rank	Status	Rank	Status
Malifut	-	-	3	19	-	0,6797	0,4432	0,6273	0,5834	12	Tertinggal	13	Tertinggal
Kao Teluk	-	-	7	4	-	0,7049	0,4742	0,6606	0,6133	8	Berkembang	8	Berkembang
Kao	-	1	8	5	-	0,6731	0,4595	0,7143	0,6156	7	Berkembang	7	Berkembang
Kao Barat	-	-	6	11	4	0,6721	0,3651	0,6317	0,5563	14	Tertinggal	16	Tertinggal
Kao Utara	-	1	5	5	1	0,6576	0,4556	0,7111	0,6081	9	Berkembang	9	Berkembang
Tobelo Selatan	-	-	12	1	-	0,6901	0,4743	0,7949	0,6531	3	Berkembang	4	Berkembang
Tobelo Barat	-	-	2	3	-	0,6503	0,5067	0,6000	0,5857	11	Tertinggal	11	Tertinggal
Tobelo Timur	-	-	-	6	-	0,5800	0,5583	0,5111	0,5498	16	Tertinggal	15	Tertinggal
Tobelo	-	3	7	-	-	0,6697	0,4850	0,8334	0,6627	2	Berkembang	2	Berkembang
Tobelo Tengah	-	3	6	-	-	0,7435	0,5241	0,7778	0,6818	1	Berkembang	1	Berkembang
Tobelo Utara	-	1	6	3	-	0,7143	0,4483	0,7334	0,6320	5	Berkembang	3	Berkembang
Galela	-	-	2	5	-	0,6939	0,5190	0,5047	0,5726	13	Tertinggal	12	Tertinggal
Galela Selatan	-	-	6	1	-	0,6645	0,5857	0,6953	0,6485	4	Berkembang	5	Berkembang
Galela Barat	-	-	6	3	-	0,7365	0,5056	0,6445	0,6288	6	Berkembang	6	Berkembang
Galela Utara	-	-	6	5	1	0,6076	0,3847	0,7945	0,5956	10	Tertinggal	10	Tertinggal
Loloda Utara	-	-	2	15	1	0,6333	0,3528	0,6704	0,5522	15	Tertinggal	14	Tertinggal
Loloda Kepulauan	-	-	-	10	-	0,6211	0,3617	0,6267	0,5365	17	Tertinggal	17	Tertinggal
Halmahera Utara	-	9	84	96	7	0,6705	0,4264	0,6837	0,6002	Berkembang			Tertinggal
		4,60%	42,90%	49,00%	3,60%								

Sumber Data: *Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara*

Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDT Trans. Untuk Indeks Ketahanan Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 adalah sebesar **67,05** dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2022 yaitu sebesar **66,70** dalam artian realisasi tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan pada tahun 2021 untuk indeks ketahanan Sosial sebesar **65,58** dari target sebesar **65,77**. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa untuk Indeks Ketahanan Sosial Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dari Indeks Ketahanan Lingkungan tahun 2021.

Analisis Kinerja (Faktor Keberhasilan dan Kegagalan)

Indeks Ketahanan Sosial Dalam hubungannya dengan Indeks Desa Membangun dan upaya untuk membangun desa mandiri (swadaya), tingkat pencapaian pada Indeks Ketahanan Sosial di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu untuk berkonsentrasi pada ukuran-ukuran IKS yang tidak hanya bersifat kategorikal saja (hanya Berharap pada data Pendamping Desa) namun lebih Membackup data tersebut secara manual yang juga diikuti pengolahannya secara mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, agar data yang dihasilkan oleh pendamping desa melalui proses inputan pada aplikasi Kemendes dapat disandingkan. Sedangkan program untuk mencapai sasaran tersebut berada di Dinas Sosial dimana terdapat program program unggulan untuk mendorong meningkatnya indeks ketahanan sosial. Desa mandiri dalam peraturan perundangan didefinisikan sebagai desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Mengukur Indeks Ketahanan Sosial seharusnya lebih dari sekedar menerapkan ukuran-ukuran formal tanpa mengetahui esensi dari Ketahanan Sosial dalam arti yang sesungguhnya. Betke (2002) menyatakan bahwa suatu komunitas memiliki ketahanan sosial apabila (1) mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhinya; (2) mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan; dan (3) mampu

mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan. Dengan elaborasi yang lebih komprehensif di dalam mengukur Indeks Ketahanan Sosial dan mampu menurunkan ukuran-ukuran baku yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundangan ke dalam operasionalisasi yang lebih lengkap, maka akan diketahui dengan tepat bagaimana sesungguhnya kondisi ketahanan sosial dari masyarakat tersebut. Memang diakui bahwa hasil pengukuran pada variabel IKS ini harus dilengkapi dengan pengukuran lainnya yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sehingga kita bisa secara akurat menyatakan bahwa status desa dalam kabupaten.

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks ketahanan Sosial melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak

Sedangkan Program – program yang dianggarkan pada Dinas Sosial, sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 440.724.500,00 terealisasi sebesar Rp. 195.800.300 atau 44,43%. Realisasi anggaran program tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat anggaran yg tidak dicairkan, dan juga tidak disertai dengan perubahan perjanjian kinerja. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100,52% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 44,43% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 226,24%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut pada Dinas Sosial sebesar Rp. 541.451.000 terealisasi sebesar Rp. 229.947.000 atau 42,47%. Realisasi anggaran program dibawah 55%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100,09% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 42,47% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 235,67%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Jika digabungkan Pagu Anggaran Sasaran 2 (dua) dengan indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Ketahanan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana & Dinas Sosial sebesar Rp. 982.175.500 dengan realisasi Rp. 425.747.300 atau

43,35%. Realisasi anggaran program dibawah 55%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **100,31%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **43,55%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **231,41%**, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

Sasaran Strategis 3:

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KETERJANGKAUAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG EKONOMI

Sasaran strategis 3 diukur dengan 1 Indikator yang terdiri 7 sub sasaran dan didukung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **98,38%**.

Tabel 20
Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2021			2022			Perbandingan		Jangka Menengah 2026
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,52	74,99	-	-	75,95	74,72	98,38	98,38	74,72%	84,98
Rata-Rata									98,38		

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan gambaran untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup, serta Tujuan 2 yaitu Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim.

Indeks Pembangunan Infrastruktur untuk mengukur capaian sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur wilayah penunjang konektivitas dan ekonomi di Halmahera Utara.

Indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur antara lain : (1) Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen); (2) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen); (3) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen); (4) Persentase rumah tangga menggunakan listrik; (5) Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

(persen); (6) Rasio konektivitas transportasi wilayah (persen); dan (7) Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen).

(1) Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)

Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (RLH) merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal layak huni terhadap jumlah rumah seluruhnya. Target capaian rasio rumah tinggal layak huni tahun 2022 **(82,29%)** sedangkan realisasi capaiannya hanya mencapai **(82,05%)** atau sebanyak **39.368** rumah layak huni dari total **47.983** rumah. Dengan demikian maka jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Halmahera Utara sampai tahun 2022 masih sebanyak **8.615** rumah. Jika membandingkan realisasi capaian tahun 2021 sebesar **81,96%** atau sebanyak **39.133** rumah layak huni dari total **47.748** rumah di Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak **8.615** rumah, maka terdapat peningkatan rumah layak huni sebanyak **235** rumah atau bertambahnya rumah tidak layak huni. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target capaian sebesar **86,06%**, maka target capaian Rumah Tinggal Layak Huni sampai tahun 2022 belum mencapai target yang diinginkan.

(2) Cakupan Rumah Tangga Memiliki Akses Pada Sumber Air Minum Bersih (persen)

Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya. Target capaian cakupan rumah tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih tahun 2022 **(77,76 %)** sedangkan realisasi capaiannya mencapai **(80,96%)** atau sebanyak **32.972** rumah tangga yang memiliki akses air bersih dari total **40.725** rumah tangga. Pencapaian Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih Melalui kegiatan pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan SPAM, baik itu dengan pembiayaan DAK maupun program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) di beberapa kecamatan yang meliputi kecamatan Kao Teluk, Kao Barat, Kao Utara, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo, Galela Selatan, Galela Utara, Loloda Utara dan Loloda Kepulauan, juga kegiatan perbaikan SPAM di kecamatan Kao Barat, Tobelo Timur dan Tobelo Barat. Jika membandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar **77,92%** atau sebanyak **31.262** rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih maka terdapat peningkatan jumlah Rumah Tangga Memiliki Akses Pada Sumber Air Minum Bersih sebanyak **1.710 orang**. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target capaian sebesar **85,00%**, maka target Cakupan Rumah Tangga Memiliki Akses Pada Sumber Air Minum Bersih sampai tahun 2022 belum mencapai target yang diinginkan.

(3) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)

Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya. Standar untuk rumah tinggal bersanitasi sekurang-kurangnya rumah tinggal tersebut mempunyai akses untuk layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Target capaian rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak tahun 2022 **(61,80%)**, sedangkan realisasi capaiannya mencapai **(52,91%)** atau sebanyak **21.547** rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak dari total 40.725 rumah

tangga. Pencapaian cakupan rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak dilaksanakan melalui Pembangunan sarana di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Malifut, Kao Barat, Kao, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo, Tobelo Utara, Galela Barat, Galela Selatan, Galela Utara dan Loloda Utara melalui kegiatan pembangunan SPALD-S, baik itu dengan pembiayaan DAK maupun Program Hibah Air Limbah Setempat (HALS). Selain itu juga dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan di kecamatan Kao Utara, Tobelo Selatan, Tobelo, Galela Utara, Loloda Utara dan Loloda Kepulauan. Jika membandingkan realisasi capaian tahun 2021 sebesar **(52,57%)** atau sebanyak **21.091** rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak, maka terdapat peningkatan jumlah rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak sebanyak 456 rumah tangga. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target capaian sebesar **75,59%**, maka target cakupan rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak sampai tahun 2022 belum mencapai target yang diinginkan.

(4) Persentase rumah tangga menggunakan listrik

Persentase rumah tangga menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya. Target capaian Persentase rumah tangga menggunakan listrik tahun 2022 **(98,14%)**, sedangkan realisasi capaiannya mencapai **(98,07%)**. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021–2026 dengan target capaian sebesar **(99,20%)**, maka target Persentase rumah tangga menggunakan listrik sampai tahun 2022 belum mencapai target yang diinginkan.

(5) Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap merupakan perbandingan antara Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik dan Sedang terhadap Total panjang jalan Kabupaten seluruhnya. Panjang Jalan Kabupaten seluruhnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 600/210/HU/2018 tanggal 13 Juli 2018 yaitu 301,20 km. Target capaian proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2022 **(75,83%)**, sedangkan realisasi capaiannya mencapai **(58,48%)** atau **176,13** km panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Jika membandingkan realisasi capaian tahun 2021 sebesar **(68,06%)** atau **205** km panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Dengan demikian maka terdapat penurunan panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 21,64 km. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021–2026 dengan target sebesar **(77,20%)**, maka target proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sampai tahun 2022 belum mencapai target yang diinginkan.

(6) Rasio konektivitas transportasi wilayah (persen)

Rasio konektivitas transportasi wilayah merupakan indikator proxy yang menggambarkan tingkat ketersediaan layanan transportasi. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terlayani trayek tetap angkutan umum terhadap jumlah desa seluruhnya seluruhnya. Target capaian Rasio konektivitas transportasi wilayah tahun 2022 **(58,70%)** sedangkan realisasi capaiannya hanya mencapai **(71,43%)** atau sebanyak **140** desa terlayani trayek tetap angkutan umum dari total 196 desa. Jika membandingkan realisasi capaian tahun 2021 sebesar **(70,92%)** atau 139 desa terlayani trayek tetap angkutan umum, maka terdapat penambahan desa terlayani

trayek tetap angkutan umum. Dengan demikian maka terdapat penurunan panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 21,64 km. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021–2026 dengan target sebesar **(90,00%)**, maka target Rasio konektivitas transportasi wilayah sampai tahun 2022 belum mencapai target yang diinginkan.

(7) Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen)

Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi merupakan indikator proxy, merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler terhadap jumlah desa seluruhnya seluruhnya. Target capaian Rasio konektivitas transportasi wilayah tahun 2022 **(84,42%)** sedangkan realisasi capaiannya hanya mencapai **(90,82%)** atau sebanyak 140 desa terlayani trayek tetap angkutan umum dari total 196 desa. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target sebesar **(99,28%)**, maka target rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi sampai tahun 2022 belum mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan capaian dari 7 (tujuh) indikator tersebut diatas, maka capaian dari sasaran **Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi** dirumuskan dengan Indeks Pembangunan Infrastruktur menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$IPI = \left(\sqrt[7]{A \times B \times C \times D \times E \times F \times G} \right) \times 100$$

Dimana:

A=Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih

B=Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak

C=Persentase rumah tangga menggunakan listrik

D=Rasio Rumah Tinggal Layak Huni

E=Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

F=Persentase desa terlayani trayek tetap angkutan umum

G=Persentase desa terlayani jaringan telekomunikasi seluler

Hasil perhitungan capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah sebesar 74,72, dengan demikian maka indeks pembangunan infrastruktur belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75,95. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target sebesar 84,98, maka target Indeks Pembangunan Infrastruktur sampai tahun 2022 belum mencapai target yang diinginkan. Dalam rangka mendorong pencapaian pembangunan infrastruktur perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program maupun kegiatan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

b. Analisis program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Pembangunan Infrastruktur melalui Program:

Tabel 21
Program dan Kegiatan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Kawasan Permukiman	1.691.620.000	1.467.073.000	86,73
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	63.598.000	12.329.000	19,39
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.668.007.500	2.346.240.500	20,11
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	24.246.360.500	2.979.229.500	12,29
5	Program Penyelenggaraan Jalan	41.263.008.000	2.191.947.500	5,31
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.637.000.000	2.098.110.000	79,56
7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.031.303.000	1.461.573.926	71,95
	Jumlah	83.600.897.000	12.556.503.426	15,02

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 83.600.897.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.556.503.426 atau sebesar 15,02%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **98,38%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **15,02%** maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **655,01%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 4 :

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN RUANG WILAYAH, LINGKUNGAN HIDUP, SERTA KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang diusung oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Kategori Capaian **BAIK** karena mencapai nilai **98,31%**

Tabel 22
Sasaran Strategis 4

No	Indikator	2021			2022			Perbandingan		Jangka Menengah 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Indeks Ketahanan Lingkungan	69,92	68,88	98,51	69,91	68,73	98,31	-0,2	-0,15	75,75

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Ketahanan Lingkungan

Indeks Ketahanan Lingkungan adlah salah satu indikator dalam menentukan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu Kualitas Lingkungan, Rawan Bencana dan Tanggap Bencana. Untuk kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas

lingkungan. Indeks Ketahanan Lingkungan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Desa Membangun (IDM). Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim menjadi tolak ukur dalam menentukan status desa dalam IDM.

Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDT Trans. Untuk Indeks Ketahanan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 adalah sebesar **68,73** dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2022 yaitu sebesar **69,91** dengan demikian realisasi tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 69,91, sedangkan pada tahun 2021 untuk indeks ketahanan lingkungan sebesar 68,88 dari target sebesar 69,29. Dengan demikian untuk Indeks Ketahanan Lingkungan Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 lebih rendah dari Indeks Ketahanan Lingkungan tahun 2021.

Penurunan/kegagalan kinerja yang terjadi dalam Indeks Ketahanan Lingkungan disebabkan karena belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta masih kurangnya kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup dan pengetahuan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta dan juga masih kurangnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas. Dengan demikian maka perlu adanya alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan lagi mengenai dengan kondisi atau keadaan sarana dan prasarana yang tersedia dan ketersediaan data dan informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup serta dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong atau meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup dan pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan bencana salah satunya melalui kegiatan sosialisasi.

Untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja dapat dicapai melalui peningkatan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup serta dengan mengoptimalkan tata cara pencegahan untuk mengurangi dampak bencana. Dengan kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah dapat mencapai target Indeks Ketahanan Lingkungan yang lebih maksimal.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Lingkungan pada tahun 2022 melalui program-program yang melekat pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain:

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Khayati)
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Penanggulangan Bencana

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 8.296.852.645 dan terealisasi sebesar Rp. 2.716.192.800 atau persentase sebesar 32,74%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan

membandingkan antara nilai capaian sebesar **98,31%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **32,74%** diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **300,30%**, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 5 :

MENINGKATNYA TRANSFORMASI STRUKTURAL DAN DAYA SAING SEKTOR UNGGULAN MELALUI INVESTASI PRODUKTIF YANG MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA LAYAK

Sasaran strategis ini diukur dari 5 (lima) indikator yang diusung oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dengan Kategori Capaian **Baik Sekali** dengan nilai capaian rata-rata **144,12%**.

Tabel 23
Sasaran Strategis 5

No	Indikator	2021			2022			Perbandingan		Jangka Menengah 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Realisasi	
1	Pertumbuhan Investasi PMTB	2,16	-	-	4,62	23,34	505,19	1131,58	36,87	11,3
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	3,72	1,66	44,62	4,43	0,52	11,74	-32,89	-1,14	7,28
3	Pertumbuhan PDRB Pariwisata	-1,42	4,78	336,62	2,48	2,75	110,89	447,51	-2,03	18,09
4	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	12,58	-	-83,67	12,58	2,20	17,49	101,16	12,73	12,58
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,46	8,01	53,30	4,86	6,06	75,31	22,01	-1,95	2,74
Rata-Rata							144,12			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Laju Pertumbuhan Investasi PMTB

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi yang merupakan indikator dalam komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). PDRB sisi permintaan diperoleh melalui pendekatan pengeluaran yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Secara umum, PDRB sisi permintaan terdiri dari 4 komponen, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor.

Laju Pertumbuhan Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 yaitu 23,34 persen meningkat atau tumbuh pesat 36,87 persen dari tahun 2021 yaitu -13,53 persen. sedangkan Capaian Kinerja tahun 2022 yaitu 505,19 persen mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2021 yaitu -626,39 persen Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah). Pertumbuhan Investasi PMTB Kabupaten Halmahera Utara masih berada dibawah Laju pertumbuhan investasi PMTB Provinsi Maluku Utara yang bertumbuh lebih cepat yaitu 61,37 persen dan lebih tinggi pertumbuhannya dari tingkat nasional 3,87 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik no. 11/02/82 th.XXII dan No. 15/02/th.XXVI, Tanggal 6 Februari 2023. Jika membandingkan realisasi tahun 2022 dengan target RPJMD tahun 2022 yaitu 4,62 persen, dengan realisasi 23,34 persen dengan capaian kinerja 505,19 persen melampaui target dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sudah mencapai pada kinerja yang sangat baik.

Terkait dengan analisis keberhasilan meningkatnya atau laju pertumbuhan bertumbuh pesat di tahun 2022 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 tidak dapat disajikan atau tidak dapat dianalisis disebabkan dinas terkait tidak menyusun atau menyajikan data tersebut sedangkan BPS hanya menyajikan hasil akhir dari kebutuhan permintaan secara umum Investasi PMTB Kabupaten Halmahera Utara.

2. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Nilai sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan dalam pertumbuhan PDRB diolah dari hasil perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik Halmahera Utara dengan memperhitungkan sumbangan sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sedangkan perikanan dan kelautan terdiri dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya pada tahun 2022 berdasarkan metode hitung atas dasar harga konstan (ADHK).

Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 tumbuh 1,66 persen dan tahun 2022 tumbuh 0,52 persen. Pertumbuhan di tahun 2021 dan tahun 2022 sama-sama tumbuh positif namun laju pertumbuhannya landai/lambat di tahun 2022. Target jangka menengah yang ditetapkan 4,43 persen maka capaian tahun 2022 menunjukan bahwa Pemerintah Daerah belum mencapai kinerja yang lebih baik dari target menengah yang ditetapkan. Jika, disandingkan dengan capaian Provinsi Maluku Utara 14,29 persen dan secara nasional 2,25 persen maka capaian Halmahera Utara lebih rendah atau lebih lambat dari capaian Provinsi dan nasional. Disebabkan terdapat fenomena yang mengakibatkan pertumbuhan ini landai/lambat yaitu tingginya intensitas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) atau serangan Sexava untuk perkebunan kelapa yang mengakibatkan produksi dari kelapa menurun, tahun 2021 produksi 72.394 ton dari target 77.298 ton atau 93,65 persen, luas areal 49.487 Ha dengan jumlah petani 33.680 KK sedangkan tahun 2022 produksi kelapa turun 466 ton menjadi 71.928 ton dari target 78,844 ton atau 91,22 persen, luas areal 49.279 Ha dengan jumlah petani 33.477 KK. (Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara). Sedangkan kategori Perikanan dan kelautan relatif konstan meningkat. Total realisasi tahun

2021 yaitu 20.959,8 ton terdiri dari produksi tangkap 20.659 ton dan produksi Budidaya 300,8 ton sedangkan tahun 2022 jumlah produksi 25.415,52 ton meningkat 4.455,62 ton dari tahun 2021. Produksi tangkap 25.082 ton dan produksi Budidaya 333,52 ton (Sumber Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Halmahera Utara). Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan maka pada tahun 2023 Halmahera Utara Mengoptimalkan Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan mengupayakan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

3. Pertumbuhan PDRB Pariwisata

Yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik untuk pertumbuhan PDRB Pariwisata adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang merupakan unsur penting bagi wisatawan, selain objek wisata yang menjadi tujuan utamanya.

Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 yaitu tumbuh 2,75 persen, turun mines 2,03 persen dari tahun 2021 yaitu 4,78 persen. Jika, disandingkan dengan capaian dari 4 (empat) kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara masi lebih rendah laju pertumbuhannya dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Kabupaten Halmahera Tengah 10,40 persen, Kabupaten Halmahera Barat 5,01 persen, Kabupaten Halmahera Timur 4,48 persen dan Kota Tidore Kepulauan 4,02 persen. (www.bps.go.id). Berdasarkan data dari website resmi <https://kemenparekraf.go.id> Kabupaten Halmahera Utara laju pertumbuhannya masih dibawah capaian Nasional yaitu 3,6 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 yaitu 2,48 persen maka realisasi tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 110,89 persen. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah menorehkan kinerja positif atau sudah mencapai pada kinerja yang lebih baik dari target yang ditetapkan.

Adapun hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan laju pertumbuhan PDRB Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) yaitu adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi tujuan wisata maupun kunjungan wisatawan di hotel/penginapan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 dengan total kunjungan wisatawan 126.864 wisatawan yang terdiri dari Destinasi Wisata 96.359 wisatawan (wisatawan nusantara 96.258 dan wisatawan asing 101) sedangkan Kunjungan wisatawan di hotel dengan total 30.505 wisatawan (wisatawan nusantara 30.116 dan wisatawan asing 389) Sedangkan total kunjungan wisatawan tahun 2021 yaitu 58.077 wisatawan yang terdiri dari Destinasi Wisata 32.391 wisatawan (wisatawan nusantara 32.356 dan wisatawan asing 35) sedangkan Kunjungan wisatawan di hotel dengan total 25.686 wisatawan (wisatawan nusantara 25.671 dan wisatawan asing 15). Sumber data Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Utara.

4. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Nilai sektor Industri Pengolahan diolah dari hasil perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik Halmahera Utara yang dihitung berdasarkan metode hitung atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2022 dengan memperhitungkan

sub sektor industri yang berkembang antara lain: Industri Pangan (Roti, kue kering, tahu, tempe, gula aren dan pengasapan ikan), Kimia dan bahan bangunan (Penggergajian kayu, perabot kayu, percetakan/fotocopy, Bata merah dan Pres), Sandang dan Kulit (Penjahitan), kerajinan dan umum (Kerajinan anyaman dan kerajinan lainnya) dan logam metal (Alat dapur, reparasi Bengkel Umum).

Tahun 2021 pertumbuhan Industri Pengolahan tumbuh negative minus 10,53 persen sedangkan tahun 2022 terjadi peningkatan tumbuh 2,27 persen meningkat 12,58 persen dari tahun 2021 yaitu minus 10,53 persen. Target jangka menengah 12,58 persen dengan realisasi tahun 2022 yaitu 2,27 dengan capaian kinerja 17,49 persen, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara belum mencapai kinerja yang lebih baik dari target menengah yang ditetapkan. Jika, disandingkan dengan Kab/kota di provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara jauh lebih rendah atau pertumbuhannya jauh sangat lambat dari Kabupaten Halmahera Tengah pertumbuhannya 129,17 persen, Kabupaten Halmahera Selatan 47,83 persen dan Kota Tidore Kepulauan 3,39 persen. Sumber data BPS, 2022 (diolah). Pertumbuhan PDRB Industri pengolahan secara Nasional 4,89 persen maka capaian Kabupaten Halmahera Utara pertumbuhannya lebih rendah atau lebih lambat.

Sektor Industri Pengolahan tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian kinerja 17,49 persen disebabkan karena Industri-Industri yang sudah ada tidak membuka lowongan kerja bahkan tidak beroperasi sama sekali dilihat dari data Industri jumlah perusahaan industri kecil menurut klasifikasi Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 yaitu 523 perusahaan sama dengan tahun 2021 yaitu 537 Jumlah Perusahaan. (Sumber Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Halmahera Utara). Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan maka pada tahun 2023 Halmahera Utara Mengoptimalkan Program Pembangunan Industri dengan mengoptimalkan sarana-sarana industry melalui kegiatan sosialisasi tentang pemberdayaan Industri Pengolahan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang berstatus pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merujuk pada penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15-64 tahun) dengan status bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang berstatus pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Kabupaten Halmahera Utara Pada Tahun 2022 jumlah Pengangguran Terbuka sebanyak 8.154 orang atau 6,06% dari 134.550 jumlah penduduk usia kerja (Sumber BPS Kab. Halmahera Utara) atau 5,84 dari 139.523 jumlah penduduk usia kerja (Sumber data Capil Kabupaten Halmahera Utara). Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu 4,86 maka capaian kinerjanya sebesar 75.31%. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 yaitu 6,06%

walaupun tidak mencapai target di Tahun 2022 namun mengalami penurunan sebesar -1,95% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2022 mencapai 3,98% (Sumber <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Nasional mencapai 5,86% (<https://www.google.com/search?q=tingkat+pengangguran+terbuka+nasional+2022&oq=tingkat+pengangguran+terbuka+nasio&aqs=chrome.1.0i512l2j69i57j0i22i30.25755j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>) hal ini menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Utara masih lebih tinggi dibanding Provinsi maupun Nasional. Faktor-faktor menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Utara dibanding tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja serta perluasan kesempatan kerja.
2. Kerjasama kepada perusahaan pemberi kerja serta melakukan kegiatan sosialisasi terkait wajib lapor lowongan pekerjaan ke perusahaan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
3. Melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta dalam melaksanakan pelatihan kerja dan pembinaan kepada perusahaan yang melakukan pemagangan dalam rangka meningkatkan kompetensi pencari kerja sehingga dapat bersaing dalam mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia.
4. Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara dengan BLK Ternate bagi pencari kerja berbasis kompetensi (*Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*).

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak Tahun 2022 melalui program-program yang melekat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, antara lain:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Penyuluhan Pertanian
9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

11. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
12. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
13. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
14. Program Pemasaran Pariwisata
15. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
17. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten Kota
18. Program Pengelolaan Industri Nasional
19. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
20. Program Penempatan Tenaga Kerja

Pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 29.082.539.748 terealisasi sebesar Rp. 19.402.957.242 atau 66,72%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **144,12%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **66,72%** peroleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **216,02%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada Indikator ini **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 6 :

MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT SERTA EFEKTIFITAS PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI USAHA-USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN KREATIF

Sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang diusung oleh 4 (empat) Perangkat Daerah yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kategori Capaian **Baik** dengan nilai capaian rata-rata **88,69%**.

Tabel 24
Sasaran Strategis 6

No	Indikator	2021			2022			Perbandingan		Jangka Menengah 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Indeks Ketahanan Ekonomi	43,36	42,68	98,43	44,83	42,64	95,11	-3,32	-0,04	9,43
2	Tingkat Kemiskinan	4,00	5,22	130,5	3,89	4,58	82,26	-12,77	-0,64	3,57
Rata-Rata							88,69			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 6: Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan

melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDT Trans. Dengan penyesuaian. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Untuk memastikan Ketahanan Ekonomi Desa secara mikro maka diperlukan alat untuk mengukurnya. Melalui pendekatan skoring dengan merumuskan indeks pada setiap deskripsi dan variabelnya, untuk Indeks Ketahanan Ekonomi pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai sebesar **42,64** dari target nilai sebesar **44,83**, sedangkan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten memperoleh nilai sebesar 42,68 dengan target nilai sebesar 43,36. disini kita melihat bahwa Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan table sebagai berikut.

Kecamatan	Desa Menurut Kategori IDM 2022					IDM Kecamatan 2022						2021	
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sgt Tertinggal	IKS	IKE	IKL	Total	Rank	Status	Rank	Status
Malifut	-	-	3	19	-	0,6797	0,4432	0,6273	0,5834	12	Tertinggal	13	Tertinggal
Kao Teluk	-	-	7	4	-	0,7049	0,4742	0,6606	0,6133	8	Berkembang	8	Berkembang
Kao	-	1	8	5	-	0,6731	0,4595	0,7143	0,6156	7	Berkembang	7	Berkembang
Kao Barat	-	-	6	11	4	0,6721	0,3651	0,6317	0,5563	14	Tertinggal	16	Tertinggal
Kao Utara	-	1	5	5	1	0,6576	0,4556	0,7111	0,6081	9	Berkembang	9	Berkembang
Tobelo Selatan	-	-	12	1	-	0,6901	0,4743	0,7949	0,6531	3	Berkembang	4	Berkembang
Tobelo Barat	-	-	2	3	-	0,6503	0,5067	0,6000	0,5857	11	Tertinggal	11	Tertinggal
Tobelo Timur	-	-	-	6	-	0,5800	0,5583	0,5111	0,5498	16	Tertinggal	15	Tertinggal
Tobelo	-	3	7	-	-	0,6697	0,4850	0,8334	0,6627	2	Berkembang	2	Berkembang
Tobelo Tengah	-	3	6	-	-	0,7435	0,5241	0,7778	0,6818	1	Berkembang	1	Berkembang
Tobelo Utara	-	1	6	3	-	0,7143	0,4483	0,7334	0,6320	5	Berkembang	3	Berkembang
Galela	-	-	2	5	-	0,6939	0,5190	0,5047	0,5726	13	Tertinggal	12	Tertinggal
Galela Selatan	-	-	6	1	-	0,6645	0,5857	0,6953	0,6485	4	Berkembang	5	Berkembang
Galela Barat	-	-	6	3	-	0,7365	0,5056	0,6445	0,6288	6	Berkembang	6	Berkembang
Galela Utara	-	-	6	5	1	0,6076	0,3847	0,7945	0,5956	10	Tertinggal	10	Tertinggal
Loloda Utara	-	-	2	15	1	0,6333	0,3528	0,6704	0,5522	15	Tertinggal	14	Tertinggal
Loloda Kepulauan	-	-	-	10	-	0,6211	0,3617	0,6267	0,5365	17	Tertinggal	17	Tertinggal
Halmahera Utara	-	9	84	96	7	0,6705	0,4264	0,6837	0,6002	Berkembang	Tertinggal		
		4,60%	42,90%	49,00%	3,60%								

Sumber Data: *Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara*

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian thd Realisasi 2021	% Capaian thd Target 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,82	68,85	68,38	100,8%	99,3%
2	Indeks Kesehatan Daerah	78,25	78,44	78,68	100,5%	100,3%
3	Indeks Pendidikan Daerah	70,71	72,22	70,91	100,3%	98,2%
4	Indeks Pembangunan Gender	89,35	89,65			
5	Indeks Ketahanan Sosial	65,58	66,70	67,05	102,2%	100,5%
6	Indeks Perkembangan Wilayah	59,04	60,48	60,02	101,7%	99,2%
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,64	68,79			
8	Indeks Ketahanan Lingkungan	68,88	69,91	68,37	99,3%	97,8%
9	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	3,30	3,66			
10	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/Tahun)	19,36	19,37			
11	Indeks Rasio Gini	0,270	0,268			
12	Pertumbuhan investasi PMTB (persen)	-12,53	4,62			
13	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan	2,72	4,43			
14	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	5,96	-1,42			
15	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (persen)	-8,81	12,58			
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	8,01	4,86			
17	Indeks Ketahanan Ekonomi	42,68	44,83	42,64	99,9%	95,1%
18	Tingkat Kemiskinan (persen)	5,22	3,89	4,58	112,3%	82,3%
19	Indeks Inovasi Daerah	6,48	44,78			

Sumber Data : *Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara*

2. Tingkat Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mendefinisikan kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: **Pertama**, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, tahun 2022 menurun menjadi 4,58 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) 5,22 persen.

Persentase penduduk miskin (PO) di Halmahera Utara pada tahun 2021 5,22 persen dengan jumlah penduduk miskin 10.160 jiwa dan tahun 2022 turun 4,58 persen dengan jumlah penduduk miskin 9.010 jiwa.

Jadi dilihat dari jumlah penduduk miskin sebelumnya 10.160 jiwa, maka terdapat penurunan angka kemiskinan di tahun 2022 sebanyak 1.150 jiwa.

Tabel 25
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)		
	2020	2021	2022
Halmahera Barat	10.56	10.59	10.06
Halmahera Tengah	7.70	7.65	6.93
Kepulauan Sula	8.81	8.36	7.84
Halmahera Selatan	12.41	12.23	11.89
Halmahera Utara	8.75	10.15	9.01
Halmahera Timur	14.97	14.58	13.00
Pulau Morotai	4.43	4.45	3.77
Pulau Taliabu	3.89	4.05	3.76
Ternate	8.18	8.45	7.54
Tidore Kepulauan	6.66	6.64	6.08
Maluku Utara	86.37	87.16	79.88

Sumber Data: Badan Penelitian dan Statistik Maluku Utara

Tabel 26
Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Halmahera Barat	8.82	8.95	8.43
Halmahera Tengah	13.56	13.52	12.00
Kepulauan Sula	8.35	8.23	7.64
Halmahera Selatan	5.21	5.19	4.99
Halmahera Utara	4.45	5.22	4.58
Halmahera Timur	15.45	15.04	13.14

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Pulau Morotai	6.46	6.52	5.42
Pulau Taliabu	7.30	7.49	6.88
Ternate	3.46	3.55	3.11
Tidore Kepulauan	6.52	6.58	5.99
Maluku Utara	6.78	6.89	6.23

Sumber Data: *Badan Penelitian dan Statistik Maluku Utara*

Jika membandingkan realisasi tahun 2022 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara maka realisasi indikator tingkat kemiskinan tahun 2022 hampir mencapai dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi di tahun sebelumnya tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,77%. Jika dibandingkan realisasi tingkat kemiskinan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-5 dari 10 Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Keberhasilan/penurunan tingkat kemiskinan dikarenakan meningkatnya Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh bantuan stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bidang ekonomi produktif (UEP), meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan pasca bencana dan adanya regulasi yang mendukung program kegiatan bidang sosial.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah melalui Badan Penelitian, Pengembangan Daerah, dan Statistik melalui Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan jaminan sosial
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Pengembangan Ekspor
8. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Jumlah pagu anggaran untuk program indikator tingkat kemiskinan sebesar Rp. 158.355.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau sebesar 0,00%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 82,26% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 0,00% maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian

sasaran sebesar 0%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Tidak Efisien**.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah .

Jumlah pagu anggaran untuk program indikator indeks ketahanan ekonomi sebesar Rp. 3.409.916.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 864.647.000 atau sebesar 25,36%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 95,11% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 25,36% maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 375,04%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Jika digabungkan dengan 2 indikator maka jumlah pagu anggaran untuk sasaran 6 sebesar Rp. 3.568.271.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 864.647.000 atau sebesar 24,23%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **88,69%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **24,23%**, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **366,01%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan Tidak Efisien **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 7 :

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS INOVASI YANG BERKELANJUTAN

Sasaran strategis 7 diukur dengan 1 (satu) indikator yang diusung oleh Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik dengan kategori capaian **Cukup** karena mencapai nilai **56,75%**.

Tabel 27
Sasaran Strategis 7

No	Indikator	2021			2022			Perbandingan		Jangka Menengah 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin)	13,12	4,40	33,53	24,60	13,96	56,75	23,22	9,56	84,34

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah

sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Indikator inovasi daerah diukur dengan membandingkan antara indeks inovasi daerah tahun yang ditinjau dengan indeks inovasi daerah tahun sebelumnya. Indeks inovasi daerah setiap tahun akan dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 000.01/398/BSKDN, Tanggal 3 Januari 2023 yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai indeks inovasi daerah sebesar 20,44 dengan total 13 inovasi. Pencapaian ini melebihi capaian pada tahun 2021 yaitu 6,48 dengan total 2 inovasi.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator peningkatan Indeks Inovasi Daerah pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan ini didukung dengan adanya inovasi-inovasi yang sudah diusung dan sebagian sudah dijalankan oleh beberapa Perangkat Daerah. Saat ini inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dari tahun 2019-2022 yang sudah dijalankan dan dalam tahap uji coba berjumlah 13 inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara

NO	NAMA OPD ASN	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	KET
1	RSUD Tobelo	Reservasi Online dan Anjungan Tunai Mandiri	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	"Simantap" (Perijinan Secara Online)	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	"Bahagia" (Bayi Lahir Langsung Miliki Akte Kelahiran)	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
4	Balitbangda dan Statistik	One Data Mantap	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
5	Dinas PU dan Penataan Ruang	"Lapen Sipetarung" (Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Android)	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
6	Bagian Administrasi dan PP Setda	Modifikasi Transaksi E-Perjadin Non Tunai	Tata Kelola Pemerintahan	Sudah Jalan
7	Dinas Pertanian	COMED di Cyber Extansion (Komunitas Peduli Data dan Informasi)	Pelayanan Publik	Sudah Jalan
8	Bagian Hukum dan HAM Setda	"Si Doi" Sistem Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	Tata Kelola Pemerintahan	Sudah Jalan
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	"Generik dengan Rumah Data" (Gerakan Akses Informasi Perikanan dengan Rumah Data)	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba
10	Desa Pitu	Pitu Bersih	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba
11	Sekretariat Dewan	"SILA ASMARA" (Sentral Informasi dan Layanan Aspirasi Masyarakat)	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba

NO	NAMA OPD ASN	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	KET
12	BKD dan PSDA	"PKeS" (Perjanjian Kinerja Eselon) Terapi SAKIP dan SAKIT	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	"SIMARDI" Sistem Manajemen Arsip Daerah	Pelayanan Publik	Tahap Uji Coba

Sumber Data: *Badan Penelitian, Pengembangan Daerah, dan Statistik*

Target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara indikator peningkatan indeks inovasi daerah adalah sebesar 84,34. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 indikator ini masih jauh dari target jangka menengah, namun mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 9,56% dengan realisasi nilai peningkatan indeks inovasi sebesar 4,40. Realisasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah dengan Pemerintah Kabupaten lainnya di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-6 dari 8 Kabupaten. Perbandingan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara peningkatan Indeks Inovasi Daerah sebesar 8,67 dengan nilai indeks inovasi daerah sebesar 33,11. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan lebih tinggi namun nilai indeks inovasi daerah-nya masih rendah dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kegagalan/penurunan kinerja indikator peningkatan Indeks Inovasi Daerah disebabkan karena masih kurangnya inovasi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Salah satu faktor yang membuat kurangnya inovasi daerah yang dilakukan yaitu kurangnya pemantauan dan dorongan bagi perangkat-perangkat daerah untuk melakukan inovasi maupun pengembangan inovasi yang telah ada. Alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan lagi mengenai inovasi daerah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong semua Perangkat Daerah untuk melakukan inovasi daerah seperti lomba dan lain sebagainya.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu kegiatan pengembangan inovasi, pemantauan berkelanjutan inovasi daerah di Perangkat Daerah terkait, pembentukan tim untuk penguatan sistem inovasi, dan pembuatan roadmap kegiatan penguatan inovasi daerah. Dengan kegiatan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat mencapai target indeks inovasi daerah sehingga target indikator peningkatan Indeks Inovasi Daerah tercapai dan sasaran strategis 7 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan Daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah melalui Badan Penelitian, Pengembangan Daerah, dan Statistik melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 1.185.354.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 475.527.000 atau sebesar 40,12%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **56,75%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **40,12%** maka diperoleh nilai efisiensi

pencapaian sasaran sebesar **141,46%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 tergambar pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran		Realisasi	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.	Pendapatan	1.096.855.070.891,00	1.336.337.226.137,00	1.125.711.238.897,78	84,24
2.	Belanja	1.148.400.345.504,00	1.436.338.457.405,00	1.183.931.766.435,53	82,43
3.	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	51.545.275.031,00	123.690.776.440,00	122.440.728.438,58	98,99
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	51.545.275.031,00	23.689.655.172,00	23.689.655.171,00	100,00

Tahun 2022 jumlah anggaran yang diperjanjikan untuk dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar Rp. 315.906.797.843 dan terealisasi sebesar Rp. 138.369.260.208 atau persentase sebesar 43,80%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1.183.931.766.435,53 maka penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 138.369.260.208 atau persentase sebesar 11,69% anggaran yang terealisasi tahun 2022 tersebut, digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) sasaran dan 55 (lima puluh lima) program yang dikelola oleh 48 (empat puluh delapan) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Alokasi anggaran per program untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan, Taraf Pendidikan Dan Kesempatan Belajar Masyarakat, Dengan Indikator Kinerja	5	189.190.706.950	101.927.685.440	Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	10	982.175.500	425.747.300	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial
3	Meningkatnya Kualitas Dan Keterjangkauan Infrastruktur	7	83.600.897.000	12.556.503.426	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Pelayanan Dasar Dan Penunjang Ekonomi				Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	3	8.296.852.645	2.716.192.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Meningkatnya transformasi structural dan daya saing sector unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	24	34.087.092.748	22.390.939.649	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	9	3.568.271.500	864.647.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	1	1.185.354.500	475.527.000	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik
Jumlah		55	315.906.797.843	138.369.260.208	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 7 (tujuh) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator kinerja, tergambar pada tabel hasil analisis capaian kinerja sasaran tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 31
Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	2,5	28,57
2	Baik (B)	1,3,4,6	57,14
3	Cukup (C)	7	14,29
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		7	100

Dari hasil analisis capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari 12 sasaran dengan pembagian sasaran adalah **2** sasaran dinyatakan **Baik Sekali (BS)**, **4** sasaran dinyatakan **Baik (B)** dan **1** sasaran dinyatakan **Cukup (C)**.

Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mengatasi masalah-masalah ini adalah:

- Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur;
- Menciptakan sistem pengelolaan data yang baik; dan
- Menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 khususnya Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Frans Manery**
Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tobelo, 24 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY

**Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, dengan indikator kinerja	Indeks Kesehatan Daerah	%	78,58
		Indeks Pendidikan Daerah	%	73,25
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	89,75
		Indeks Ketahanan Sosial	%	68,1
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	77,4
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	70,86
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB	%	6,49
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	%	5,14
		Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	6,38
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	12,58
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,3
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	47,1
		Tingkat Kemiskinan	%	3,8
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan,	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)	%	5,84

Tobelo, 24 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
INSPEKTORAT

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A

TOBELO

Kode Pos. 97762

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tobelo, 31 Maret 2023

INSPEKTUR

Drs. Tonny Kappuw

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP.197208171992031011

Scanned with CamScanner



CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022

NO	PERNYATAAN		CHECKLIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	☒
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	☒
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	☒
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	☒
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	☒
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	☒
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	☒

Scanned with CamScanner

		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	☒
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	☐
III	Subtansi	1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
		2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	☒
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☐
		4. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kerja	☒
		5. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	☒
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☐
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	☒
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	☒
		9. Jika "Tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	☒
		10. IKU dan IK telah SMART	☒

Scanned with CamScanner

Keterangan : $\sqrt{\text{ }}$ = Ya

X = Tidak

Yang menjadi perhatian atas Catatan Hasil Reviu (CHR) LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 yaitu Belum ditetapkan mekanisme penyampaian data kinerja dari unit kerja ke penyusun LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Dari 14 indikator kinerja yang diperjanjikan dalam PK Bupati Halmahera Utara tahun 2022 yang telah disajikan dalam LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 terdapat 13 indikator kinerja telah menyajikan upaya perbaikan ke depan sedangkan 1 indikator kinerja belum menyajikan upaya perbaikan ke depan.



Scanned with CamScanner